

**IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS
SYARIAH (DPS) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM
PEMBIAYAAN *SYARI'AH* (KSPPS)
(Studi Kasus di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)
SKRIPSI**

Di Susun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh
ITSNA NUR FARIKHAH
132311074

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (o24) 7601292
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Itsna Nur Farikhah

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melalui proses bimbingan dan perbaikan bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Itsna Nur Farikhah

NIM : 132311074

Judul Skripsi : **Implementasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) (Studi Kasus di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sahidin, M.Si.

NIP. 19670321199303 1005

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum

NIP. 19760615200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Telp. : Fax. 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Itsna Nur Farikhah
NIM : 132311074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Implementasi Peran dan Fungsi Dewan pengawas (DPS) pada
KSPPS (Studi Kasus di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)**
Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang, dinyatakan Lulus pada tanggal:

17 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 27 Januari 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji I

Penguji II

24/18
1

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001



Drs. H. Ahmad Ghazali, M.Si.
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

(Qs. Ali Imran: 104).

PERSEMBAHAN

*Karya ini penulis persembahkan kepada
Robbi, pujaan hatiku, yang selalu menuntunku di setiap langkah
hidupku, dan menjadikan ku insan yang insyaAllah selalu tunduk
akan sabda-sabda.Nya*

*Kepada Ibu dan bapakku tercinta dan terkasih yang selalu
mengucurkan dana dan mendoakan putri kecilnya dalam setiap
sujudnya, karena do'a kalianlah yang membuatku menjadi wanita
tegar dan tangguh dalam menjalani sekenario kehidupan dari.Nya
dan semoga karya ini bisa menjadi salah satu tanda baktiku
kepada kalian.*

*Mbak ku Ani badriyah tercinta dan terkasih yang selalu
mencurahkan kasih sayangnya kepadaku, sehingga aku bisa
melewati step kehidupan ini.*

*Kepada semua guru-guru serta ustadz dan ustadzah yang telah
mendidik dan memberikan ilmunya kepada ku selama ini
serta kepada teman-temanku yang baik hati dan selalu
mendukung dan mendampingiku menghadapi perjuangan ini.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali, informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Januari 2018



Deklarator


Itsna Nur Farikhah

NIM. 132311074

ABSTRAK

Sudah sejak lama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan peraturan mengenai DPS yaitu Keputusan DSN MUI No.3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan pengawas Syariah yang harus memiliki minimal 3 DPS dan memiliki sertifikat dari DNS MUI, dan di Bojonegoro sekarang sudah banyak KSPPS yang telah berdiri dan berjalan. Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “Implementasi peran dan fungsi Dewan pengawas (DPS) pada KSPPS (Studi kasus di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)”. Rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi peran dan fungsi Dewan pengawas (DPS) pada KSPPS di Bojonegoro? (2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi Dewan pengawas (DPS) pada KSPPS di Bojonegoro?

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian non doctrinal dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data (bahan hukum primer) peneliti menggunakan Keputusan DSN MUI No.3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan pengawas (DPS) dan keputusan Menteri Koperasi & Usaha Kecil Menengah republik Indonesia No.16/Per/M.KUKM/IX/2015, sedangkan untuk bahan hukum sekunder dilakukan dengan wawancara anggota DPS, ketua pengelola KSPPS, teller KSPPS serta ketua Forum Koperasi Syariah, dan dokumentasi dari 10 KSPPS yang ada di Bojonegoro. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, implementasi fatwa DSN tentang DPS belum semua KSPPS mengikuti peraturan dari DSN MUI untuk memiliki minimal 3 anggota DPS dan memiliki sertifikat DSN MUI, dan jika ada KSPPS yang sudah memiliki DPS namun tidak berjalan dengan semestinya. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan DPS karena kurangnya kesadaran dari berbagai pihak bagaimana pentingnya keberadaan DPS itu dalam sebuah KSPPS.

Kata Kunci: (fatwa DSN-MUI No.3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan pengawas Syariah, implementasi, DPS)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين اما بعد

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan Islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaat bagi kita semua.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam SK yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus DSN-MUI.

Tugas DPS adalah melakukan pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki acuan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), serta norma-norma yang menyangkut operasionalisasi LKS, Produk syariah, dan moral manajemen. Melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional LKS. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang LKS melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian dan masih banyak lagi.

Namun pada realisasinya memang masih banyak sekali kekurangan yang terjadi di lapangan salah satunya yaitu terkait dengan kompetensi DPS dan peran DPS yang belum optimal, banyak faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi karena lemahnya pengawasan DPS, hal itu dikarenakan DPS tidak mengawasi operasional Lembaga Keuangan Syariah setiap hari, akibatnya terjadi kesalahan mendasar yaitu hilangnya nilai-nilai dari produk-produk LKS. Sumber daya manusia (SDM) DPS yang mengerti tentang dunia ekonomi, keuangan, dan akuntansi disamping ilmu agama dan fiqh muamalah pun masih sangat jarang. Selain itu yang menjadi hal terpenting adalah independensi DPS dari perbankan syariah itu sendiri. DSN-MUI sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas ke-syariahan perbankan syariah seharusnya membawahi DPS sebagai bagian dari bentuk pengawasan DSN terhadap operasional LKS, agar peran dan fungsinya memang benar-benar bisa dioptimalkan. Karya tulis dengan judul dengan judul ***“Implementasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) (Studi Kasus di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)”***, bermaksud mengetahui bagaimana implementasi pengawasan yang terjadi pada KSPPS yang ada di Bojonegoro khususnya pada Forum Koperasi Syariah, apakah sudah sesuai dengan keputusan DSN MUI no.3 tahun 2000 tentang petunjuk petunjuk pelaksanaan penetapan anggota dewan sayriah?.

Karya tulis yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa ada “tangan baik” yang ikut serta membantu, baik berkaitan dengan proses penulisan, maupun proses pembelajaran selama kuliah berlangsung karena itu penulisan menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing I Bapak Drs. Sahidin, M.Si yang dengan sabar dan memberikan banyak ilmu dalam bimbingan penyelesaian skripsi ini
2. Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum selaku pembimbing II yang juga banyak membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
6. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, yang tlah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Semoga Allah membalas semua amal mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis juga menyadari

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Sehingga kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 27 Desember 2017
Penulis

Itsna Nur Farikhah
132311074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH	
A. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah	19
1. Pengertian KSPPS	19

2. Prosedur pendirian KSPPS.....	20
3. Macam-macam bentuk KSPPS	23
4. Ciri-ciri KSPPS	24
5. Prinsip operasional KSPPS	25
6. Fungsi KSPPS	27
7. Struktur organisasi dan manajemen.....	28
8. Akad dan produk KSPPS	30
B. Pengawasan Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	31
BAB III PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA FORUM KOPERASI SYARIAH (FKS) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BOJONEGORO	
A. Profil Forum Koperasi Syariah (FKS) Bojonegoro	42
1. Sejarah forum koperasi syariah (FKS) Bojonegoro	42
2. Visi dan misi FKS	43
3. Program FKS	44
4. Kantor bersana dan parter	45
B. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjadi anggota FKS cabang Bojonegoro 2017	46

C. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas pada KSPPS di Bojonegoro	49
D. Pelaksanaan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah dan mekanisme pelaksanaannya pada KSPPS di Bojonegoro	53

BAB IV PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH DI BOJONEGORO

A. Analisis implementasi peran dan fungsi Dewan pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS di Bojonegoro	63
B. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran dan fungsi DPS pada KSPPS di Bojonegoro	83

BAB V PENUTUP DAN KESIMPULAN

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	90
C. Penutup	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan banyak yang meragukan lembaga konvensional karena terkandung riba di dalamnya maka lembaga keuangan Syariah adalah solusi terbaik dalam melakukan pengelolaan uang atau melakukan pembiayaan. Tidak heran sekarang perkembangan lembaga keuangan *syari'ah* saat ini sedang berada di tingkat kejayaan seperti pegadaian *syari'ah*, dan asuransi *syari'ah*.

Baitul maal wattamwil (BMT) yang dalam peraturan sekarang ini telah berubah nama menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan *Syari'ah*) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro *syari'ah*. *Baitulmaal* berfungsi sebagai pengumpulan dan penyaluran dana untuk kepentingan sosial, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Jadi dalam *baitul maal wa tamwil* adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan¹.

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menjalan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Menerapkan prinsip-

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Keadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 353.

prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk menstabilkan dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan *Syari'ah*) mempunyai karakteristik tersendiri dalam pengelolaan keuangan, karakteristik yang paling terlihat dalam lembaga keuangan *syari'ah* yaitu penerapan akad-akad baik dalam produk pembiayaan ataupun produk tabungan. Selain perbedaan karakteristik penerapan akad-akad baik dalam produk pembiayaan ataupun produk tabungan semua lembaga keuangan *syari'ah* mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS), tidak terkecuali baik itu Bank *syari'ah*, Pegadaian *syari'ah*, Asuransi *syari'ah*, dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan *Syari'ah*.

Agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berjalan sesuai dengan kaidah Islam maka MUI mengeluarkan peraturan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah). Berdasarkan Surat Keputusan DSN No. 3 tahun 2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN.

Dalam prakteknya lembaga keuangan *Syari'ah* prinsip-prinsip dan pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh keputusan Dewan *Syari'ah* Nasional (DSN) tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota dewan pengawas syariah

(DPS) No. 3 tahun 2000 yaitu salah satunya setiap Lembaga Keuangan Syariah diwajibkan memiliki anggota DPS yang melakukan pengawasan secara periodik dan melaporkan kepada DSN minimal 2 kali dalam satu tahun, dimana DPS ini bertujuan untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah; Resiko-resiko dalam bisnis tidak mungkin pula dihilangkan. Karena resiko itu pasti akan ada, maka yang kita lakukan adalah meminimalisirnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penting adanya implementasi Keputusan DSN-MUI tersebut agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dan lebih memberikan jaminan atau kepastian keamanan bagi pengguna jasa LKS. DSN MUI telah mengeluarkan keputusan No. 03 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah dan pada tahun 20015, Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan No.16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Dalam SK ini mengatur bahwa Dewan Pengawas merupakan salah satu syarat koperasi jasa keuangan syariah.

Namun masih ada praktek di lapangan beberapa kasus KSPPS yang melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah, selain kendala belum optimalnya peran DPS, juga

permasalahan lainnya adalah sebagian besar KSPPS belum mampu memenuhi syarat-syarat penetapan anggota DPS sesuai Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai Analisa Implementasi Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 Berkaitan Dengan Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS di Bojonegoro yaitu BMT Nurul ‘ummah Bojonegoro, Kopsyah BMT Fanshob Karya Bojonegoro, Kopsyah BMT Dinar Nasyiah 1 Bojonegoro, KSPPS Amanah Bojonegoro, BMT Dinar Mulia Bojonegoro dan KJKS BMT El Wanita Fanshob Bojonegoro. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui implementasi dari Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 pada KSPPS di Bojonegoro, dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan Keputusan DSN-MUI serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada dengan judul “IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) (STUDI KASUS DI FORUM KOPERASI SYARIAH BOJONEGORO)”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini di teliti dengan dua rumusan masalah yang di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peran dan fungsi dewan pengawas syariah (DPS) Pada koperasi simpan pinjam pembiayaan *syari'ah* (KSPPS) (studi kasus di forum koperasi syariah Bojonegoro)?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi dewan pengawas syariah (DPS) Pada koperasi simpan pinjam pembiayaan *syari'ah* (KSPPS) (studi kasus di forum koperasi syariah Bojonegoro)?

C. Tujuan Penelitian

Seseorang yang melakukan penulisan karya ilmiah tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu dibalik penulisan tersebut, tujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang sedang di jadikan objek penelitian. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi peran dan fungsi dewan pengawas syariah (DPS) Pada koperasi simpan pinjam pembiayaan *syari'ah* (KSPPS) (studi kasus di forum koperasi syariah Bojonegoro).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi dewan pengawas syariah (DPS) Pada koperasi simpan pinjam pembiayaan *syari'ah* (KSPPS) (studi kasus di forum koperasi syariah Bojonegoro).

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar menambah khazanah ilmu pengetahuan mahasiswa muamalah selain yang telah di peroleh di bangku perkuliahan, selain itu juga memberi bekal dan pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah ke dalam kehidupan di masyarakat kelak.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi ilmu pengetahuan bagi penelitian tentang dewan pengawas *syari'ah* dan sebagai media untuk mengembangkan khazanah teori yang berhubungan dengan hukum muamalah.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindarkan asumsi duplikasi ataupun plagiatisasi sekaligus sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini.

Tinjauan pustaka adalah suatu tahap yang harus dilakukan, karena tahap ini bagian penting untuk menentukan “*state of the art*” (sebuah langkah mutakhir dari penelitian yang dilakukan ini), di

mana penelitian yang dilakukan dapat dibedakan dengan penelitian lain di mana pun².

Maka penulis memaparkan beberapa literatur dari jurnal, buku dan hasil penelitian terdahulu, yang diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang di susun oleh Hendra Purnawan (062311011) fakultas Syariah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Walisongo Semarang 2012 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Persepsi dan Peran Dewan Pengawas Syari’ah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Kabupaten Semarang Terhadap Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran”. Dalam skripsi ini membahas mengenai peran DPS dalam menangani suatu problem di lembaga tersebut dan mengacu pada Fatwa DSN-MUI sehingga dalam memutuskan suatu produk atau keputusan tertentu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah yang telah ada³.

Kedua, Skripsi yang di susun oleh Anik Arofah (E 0003077) fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008 dalam skripsinya yang berjudul “Peran dewan pengawas syariah terhadap

² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, serta Ilmu-ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 30.

³ Skripsi Hendra Purnawan, *Analisis Persepsi dan Peran Dewan Pengawas Syari’ah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Kabupaten Semarang Terhadap Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran*, IAIN Walisongo 2012.

pengawasan aspek syariah di baitul maal wa tamwil (bmt) Safinah Klaten”. Dalam skripsi ini membahas mengenai wewenang dan tanggung jawab DPS BMT Safinah mengacu pada PAS 002 BMT, tidak ada ikatan atau hubungan struktural dengan DSN. Namun DPS BMT Safinah juga bertugas untuk menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, penerapan fatwa DSN dan PAS 002 BMT⁴.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Devika Refgiani (041211431023) fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya 2016 dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah (studi kasus pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru oleh DPS pada BPRS Amanah Sejahtera telah sesuai dengan SEBI NO 15/22/DPbS. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya oleh DPS pada BPRS Amanah Sejahtera tidak memenuhi satu dari sembilan poin yang terdapat pada SEBI No 15/22/DPbS. Secara umum pengawasan DPS pada BPRS Amanah Sejahtera telah efektif karena DPS tidak hanya melakukan pengawasan yang baik tapi juga memberikan perbaikan dan pembinaan, DPS melakukan pengawasan dengan kemampuan

⁴ Skripsi Anik Arofah, Peran dewan pengawas syariah terhadap pengawasan aspek syariah di baitul maal wa tamwil (bmt) Safinah Klaten, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008.

terbaiknya dan DPS memberikan prioritas pada BPRS Amanah Sejahtera⁵.

Keempat, Skripsi yang di susun oleh Yusuf Suhendi (06380068) jurusan Muamalat fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan (UIN) Kalijaga Yogyakarta 2010 dalam skripsinya yang berjudul “Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta”. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana aplikasi di lapangan pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta dengan antara aturan baik aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) atau Fatwa DSN-MUI⁶.

Kelima, Jurnal AHKAM (Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam) Fakultas *Syari'ah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Volume XVIII/ Edisi I/ April 2007. Jurnal ini di tulis oleh Ari Kristin P. dengan judul “*Analisis pengaruh faktor ekonomi dan religiusitas terhadap persepsi supervisor dan manajer mengenai independensi Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Syariah di Indonesia*”. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang independensi DPS yang meliputi pengertian tugas serta wewenang

⁵ Skripsi Devika Refgiani, efektivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah (studi kasus pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera), UNAIR 2016.

⁶ Skripsi Yusuf Suhendi, Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta, UIN SUKA 2010.

DPS dalam pengawasan di sebuah lembaga *syari'ah* yang berada di Indonesia⁷.

Keenam, Jurnal Syiar Hukum fakultas Hukum UNISBA volume. XIII. No. 3 November 2011. Jurnal ini di tulis oleh Neneng Nurhasanah dengan judul “*Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syari'ah*” Dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang berbagai macam peran DPS baik itu dalam pembangunan ekonomi ataupun yang di tentukan dalam Undang-Undang, serta bagaimana cara untuk melakukan pengoptimalan sebaik mungkin tugas DPS di dunia Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu yang pertama, harus menguatkan regulasi terhadap keberadaan DPS di Lembaga Keuangan Syari'ah. Kedua, pemerintah diharapkan untuk melakukan pemahaman bahwa DPS berperan penting dalam melakukan pembangunan ekonomi *syari'ah*. Ketiga, meningkatkan kualitas Sumber Daya Islami agar memahami berbagai aspek dan materi tentang muamalah untuk calon Dwan Pengawas Syariah⁸.

Dari keseluruhan penelitian yang disebutkan di atas, penyusun belum menemukan pembahasan mengenai permasalahan implementasi DSN-MUI no. 3/DSN-MUI/ 2000 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS di Bojonegoro. Selain itu

⁷ Jurnal ahkam. Ari Kristin P. (Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam) Fakultas *Syari'ah* Institut Agama Islam Negri (IAIN) Walisongo Semarang Volume XVIII/ Edisi I/ April 2007.

⁸ Jurnal Syiar Hukum. Neneng Nurhasanah fakultas Hukum UNISBA volume. XIII. No. 3 November 2011.

juga terdapat perbedaan-perbedaan dan kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, perbedaannya yaitu penelitian ini lebih pada implementasi Kep.DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 berkaitan tentang DPS pada KSPPS. Apakah keputusan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau apakah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh MUI untuk dilaksanakan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) khususnya yang berada di Bojonegoro.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia⁹. Metode penelitian studi kasus merupakan salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap keseluruhan obyek secara genesis dan biasanya dipergunakan metode sintesis di dalam pengumpulan datanya¹⁰.

Untuk mendapatkan kajian yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁹ Dudung abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2013), h.9.

¹⁰ Aji Damanuri, *Metode penetian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h.13.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Guna memperoleh data yang sesuai dengan penelitian yang dikaji, maka penulis melakukan penelitian pada KSPPS yang ada di Bojonegoro, tentang DPS pada setiap KSPPS. Dalam penelitian hukum, penelitian ini juga disebut sebagai penelitian normatif empiris. Alhasil, penelitian ini terfokus pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai.¹¹

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui nara sumber¹². Peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian pada KSPPS di Bojonegoro, yaitu direktur KSPPS, ketua Forum

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 24.

¹² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 129.

komunikasi syariah Jawa Timur, anggota DPS dan teller pada KSPPS.

b. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan skripsi, tapi bersifat sebagai pendukung. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: keputusan Menteri Koperasi & Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, serta keputusan DSN-MUI no.3 tahun 2000 tentang pelaksanaan dan penetapan Dewan Pengawas Syariah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini seperti: buku Adrian Sutedi, Perbankan Syariah: Tinjauan dan beberapa Segi Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet, 1, 2009),

Departemen Agama RI, 2009, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Rilis grafika, Farook, S., M.K. Hassan, dan R. Lanis. 2011. "Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks". Journal of Islamic Accounting and Business Research. Vol. 2. No. 2, dan Hussain, S.H. dan C. Mallin. 2003. "The dynamics of corporate governance in Bahrain: structure, responsibilities and operation of corporate boards". Corporate Governance: An International Review. Vol. 11. No. 3.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya¹³, misalnya dokumen dari 10 KSPPS yang ada di Bojonegoro.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab

¹³ Ali, *Metode...*, h.106

pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* aatau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya¹⁴. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat terbuka dan nonformal kepada direktur BMT NU Bojonegoro, ketua Forum Komunikasi Syariah Bojonegoro, anggota DPS yang melakukan pengawasan pada KSPPS yang ada di Bojonegoro, serta teller maupun petugas yang berwenang pada 10 KSPPS yang ada di Bojonegoro.

b. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu¹⁵. Dalm observasi peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitanya. Makin banyak informasi yang dikumpulkan semakin baik, oleh sebab itu pengamatan harus seluas mungkin dan catatan observasi harus selengkap mungkin¹⁶.

¹⁴ Juliansyah Noor, *metodologi Penelitian*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 138-139.

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara observasi dan Focus Groups*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 143.

¹⁶ S.Nasution, *metode penelitian naturalistik kualitatif*, (Bandung: Transito, 1996), h. 23.

Peneliti melakukan observasi pada sepuluh KSPPS yang ada di Bojonegoro yang menjadi objek penelitian untuk bahan pendukung penulisan skripsi ini agar memperoleh diagnosis dari masalah yang terjadi.

c. Dokumentasi

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan lain sebagainya¹⁷.

Dalam mencari data penulis menggunakan bahan-bahan dokumen dari berbagai sumber yang berada dilokasi penelitian, seperti data-data mengenai DPS yang peneliti dapatkan pada 10 KSPPS di Bojonegoro, seperti sertifikat DPS dari DSN-MUI, struktur organisasi KSPPS di Bojonegoro dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, obsevasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam

¹⁷ Jonathan, *Op.Cit*, h. 225.

kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸

Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles dan Huberman,¹⁹ yaitu reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian, data dipilih sesuai dengan konsep dewan pengawas syariah dan efektifitasnya, sehingga dapat dianalisis dengan mudah.

Display data ialah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, ataupun grafik.

Mengambil kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep dewan pengawas syariah dan efektifitasnya pada KSPPS di Bojonegoro²⁰.

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 89

¹⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Kualitatif Data Analysis*, (London: Sage Publication, 1984), h. 21.

²⁰ Aji Damanuri, *Op. Cit.*, h.154.

G. Sistematika Penulisan

Agar sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang dibuat sedemikian rupa dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan sistematis dengan harapan agar para pembaca mudah untuk memahaminya, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I membahas tentang pendahuluan, yang menguraikan masalah pokok yang akan dibahas yang berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II membahas tentang KSPPS, landasan teori Dewan Pengawas Syariah. Berisikan tentang pengertian, kedudukan, fungsi, tugas, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah.

BAB III membahas tentang pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS yang berada di Forum Koperasi Syariah (FKS) Bojonegoro.

BAB IV berisi tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS di Bojonegoro apakah sudah sesuai dengan DSN serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

BAB V bagian penutup, yang memuat tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian KSPPS

Banyak masyarakat yang masih awam dengan istilah koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan lebih familiar dengan istilah BMT (Baitul Maal wa Tamwil), karena Kementerian Koperasi baru mengeluarkan surat edaran pada tahun 2015 silam, yaitu Peraturan Menteri Koperasi (permenkop) Nomor 16 Tahun 2015 yang isinya menghimbau agar BMT-BMT yang berbadan hukum koperasi dan menamakan dirinya KJKS supaya beralih menjadi KSPPS.

Sesuai dengan Permenkop Nomor 16 Tahun 2015, yang dimaksud Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.

Sedangkan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam

kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sedangkan menurut Farid Hidayat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah, oleh karena itu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI¹.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan sebuah lembaga yang bergerak pada bidang keuangan berbasis syariah dan saat ini sangat digandrungi oleh masyarakat di Indonesia.

2. Prosedur Pendirian KSPPS²

Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya. Ada beberapa tahapan dalam mendirikan KSPPS. Tahap pertama adalah persiapan. Pada tahap

¹ Farid Hidayat, Mahkamah, alternative sistem pengawasan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (kspps) dalam mewujudkan syariah compliance, Yogyakarta: Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 401.

²<http://www.arditobhinadi.com.berita-148-mengenal-koperasi-simpan-pinjam-dan-pembiayaan-syariah>. Oleh Dr.H.Ardito Bhinadi,SE.,M.Si., di akses pada 04 Agustus 2017

ini yang harus dilakukan adalah mengumpulkan calon pendiri koperasi. Jumlah calon pendiri koperasi primer minimal 20 orang. Pada tahap persiapan perlu ditentukan apakah anggotanya hanya satu wilayah kabupaten/kota, lintas kabupaten/kota, atau lintas daerah provinsi. Wilayah keanggotaan ini akan menentukan jumlah modal minimal pendirian koperasi.

Tahap pertama, modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam satu daerah Kabupaten/Kota minimal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah daerah provinsi minimal sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi minimal sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Modal sendiri KSPPS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.

Tahap kedua, sosialisasi. Para calon pendiri koperasi menghadirkan Dinas Koperasi setempat untuk memberikan sosialisasi dan pengarahan tentang koperasi secara umum dan KSPPS. Dinas Koperasi setempat akan menjelaskan tentang

koperasi, prinsip-prinsip koperasi, badan hukum koperasi, pendirian koperasi dan perkoperasian lainnya.

Tahap ketiga, proses pendirian. Para pendiri membuat draft Anggaran Dasar Koperasi, nama koperasi, bidang usaha koperasi, besarnya simpanan pokok dan wajib, keanggotaan, organisasi koperasi dan modal koperasi. Para pendiri juga merancang susunan pengurus, pengawas, dan dewan pengawas syariah. Pengurus koperasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. KSPPS karena menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah, maka wajib memiliki dewan pengawas syariah (DPS). Jumlah DPS paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.

Tahap keempat adalah rapat pendirian. Pada saat rapat pendirian, Dinas Koperasi akan hadir untuk memberikan pengarahan dan mengawasi jalannya rapat pendirian. Rapat pendirian membahas agenda Anggaran Dasar dan susunan pengurus, pengawas, dan DPS. Rapat pendirian juga menunjuk beberapa orang pendiri untuk diberikan kuasa mewakili para pendiri mengurus badan hukum koperasi.

Tahap kelima adalah pengurusan badan hukum. Semua persyaratan pendirian koperasi dibawa ke Dinas Koperasi untuk diverifikasi kelengkapannya. Setelah dinyatakan lengkap oleh Dinas Koperasi, maka para kuasa pendiri koperasi mendatangi

notaris untuk pengesahan Anggaran Dasar dan pendaftaran pengurus badan hukum secara online. Sejak April 2016, pendaftaran badan hukum dan ijin koperasi dilaksanakan secara online. Kuasa pendiri koperasi membuka rekening di bank syariah sebagai syarat bahwa modal pendirian koperasi telah disetor. Selanjutnya notaris yang akan mengurus dan mendaftarkan secara online. Kurang lebih satu bulan sejak pendaftaran secara online dinyatakan lengkap berkasnya, insya Allah badan hukum KSPPS akan dikeluarkan oleh Kemenkop UKM.

Proses pendirian KSPPS mudah dan cepat, KSPPS menjadi solusi bagi pihak yang ingin bertransaksi secara syariah namun belum memenuhi persyaratan bank teknis, atau masih sulit mengakses bank syariah. KSPPS menjadi salah satu solusi untuk menjauhi transaksi riba dan transaksi-transaksi haram lainnya. Hidup lebih barokah dengan menjalankan transaksi syariah bersama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

3. Macam-macam bentuk KSPPS

Terdapat dua bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu³ :

- a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang atau seorang.

³ Farid Hidayat, *op.cit*, hlm.395.

- b. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Wilayah keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Primer dan Sekunder terdiri dari :

- 1) Wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- 2) Wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- 3) Wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi.

4. Ciri-ciri KSPPS

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial melainkan dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.

- c. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan KSPPS itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.⁴
- d. Staf dan karyawan KSPPS bertindak proaktif menjemput bola serta pelayanannya mengacu kepada kebutuhan anggota.
- e. KSPPS mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini lebih efektif dilakukan secara berkelompok dengan perbincangan mengenai bisnis sekaligus dilakukan angsuran dan simpanan.
- f. Manajemen KSPPS adalah professional Islami⁵. Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Setiap bulan KSPPS akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.

5. Prinsip Operasional KSPPS

Dalam menjalankan usaha mengelola uang anggota koperasi, maka KSPPS berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan *muamalah* Islam ke dalam kehidupam nyata.

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2015, hlm. 320.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Jakarta: UII Press, 2004, hlm. 132.

⁶ Muhammad Ridwan, *op.cit*, hlm. 131.

- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen KSPPS untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, berarti tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yang didasari dengan keimanan.
- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

Dengan prinsip-prinsip tersebut maka kerja yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kehidupan di dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani di akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan gairah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.

6. Fungsi KSPPS

- a. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah. KSPPS dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.⁷
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salām (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah.
- c. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- d. Mengembangkan kesempatan kerja.
- e. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- f. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk membangun usaha produktif.
- g. Menjadi perantara keuangan antara shohibul mal dengan du'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.⁸

⁷ Mardani, *op.cit*, hlm. 322.

⁸ *Ibid*, hlm. 323.

7. Struktur Organisasi dan Manajemen

Struktur organisasi KSPPS menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan tugas masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing KSPPS dapat memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Namun demikian, struktur organisasi minimal dalam setiap KSPPS terdiri sebagai berikut:⁹

a. Musyawarah anggota tahunan

Musyawarah ini dilakukan setiap satu tahun sekali, yang dihadiri oleh seluruh anggota atau perwakilannya. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen KSPPS.

b. Dewan pengurus

Dewan pengurus KSPPS pada hakikatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karenanya, pengurus harus dapat menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya. Amanah ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya.

c. Dewan pengawas syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan KSPPS terutama yang berkaitan dengan sistem

⁹ Muhamad Ridwan, *op.cit*, hlm. 140.

syariah yang dijalankan. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

d. Dewan pengawas manajemen

Dewan Pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Memberikan saran, nasihat dan usulan kepada pengurus. Anggota dewan pengawas manajemen dipilih dan disahkan dalam musyawarah anggota tahunan.¹⁰

e. Pengelola

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus dalam menjalankan fungsi operasional keseharian. Satuan kerja pengelola dapat terdiri minimal:¹¹

- 1) Manajer/ Direktur, merupakan struktur pengelola yang tertinggi, berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional juga berfungsi melakukan kontrol terhadap kinerja karyawan.
- 2) Pembukuan, staf khusus yang memahami masalah akuntansi keuangan syariah dan berfungsi membuat laporan keuangan.
- 3) Pemasaran, berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran, melakukan analisis usaha anggota calon peminjam. menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan, menjemput simpanan dan tabungan anggota.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 144.

¹¹ *Ibid*, hlm. 144.

- 4) Kasir, melakukan pembukaan dan penutupan kas setiap hari serta membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta merekapnya dalam catatan uang keluar dan masuk.

8. Akad dan Produk KSPPS

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad. Yakni menggunakan 3 prinsip:¹²

- a. Prinsip bagi hasil. Dengan prinsip ini ada pembagian hasil antara pemberi pinjaman dengan KSPPS. Seperti *muḍārabah*, *musyārah*, *muzāra'ah*, dan *musāqah*.
- b. Prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya KSPPS mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama KSPPS, kemudian KSPPS akan menjual barang tersebut dengan ditambah mark-up. Keuntungan KSPPS nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Seperti bai' al-murābahah, bai' as-salam, bai' al-istiṣna, bai' bisaman 'ajil.
- c. Prinsip non profit. Prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan *qardul hasan*, merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah hanya perlu mengemblikan pokok pinjamannya saja.

¹² Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah: Bank; LKM; Asuransi; dan Reasuransi*, Yogyakarta: Safinia Insania Press, 2008, hlm. 47.

B. Pengawasan Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah

Pengawasan (*supervision*) adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan suatu kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur, sehubungan dengan bank, pengawasan dapat diartikan sebagai pemantauan kegiatan operasional bank agar dijalankan sesuai dengan ketentuan.¹³

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 juga menjelaskan tentang pengawasan koperasi yaitu upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat agar organisasi dan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Dari penjelasan-penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa pengawasan pada koperasi sangat diperlukan agar kegiatan operasional koperasi bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Pemaparan tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPS dapat dijelaskan dalam beberapa hal berikut:

¹³ Winarno, dkk, *Kamus Perbankan*, Cet. 1, Bandung, Pustaka Grafika, 2006, hlm. 282

¹⁴Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

1. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan DPS dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu:¹⁵

a. Struktur Organisasi

Pengawasan kepada struktur organisasi dilakukan kepada setiap pengurus LKS. Pengawasan ini tertuju pada pemahaman dan kinerja pengurus dan karyawan LKS. Apabila DPS menemukan kinerja pengurus dan karyawan LKS kurang atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka DPS dapat mengambil tindakan.

b. Operasional usaha yang dibiayai

Pengawasan ini tertuju pada produk dan operasionalisasi produk yang dikeluarkan oleh LKS. Sama halnya dengan lingkup struktur organisasi, dalam pengawasan ini DPS dapat mengambil tindakan manakala menemukan operasional usaha yang dibiayai kurang atau tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dari penjelasan diatas jelas sekali bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilakukan tidak hanya terkait dengan produk dan operasional produk saja melainkan juga kepada struktur organisasi (SDM). Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan tidak hanya bertujuan pada aspek produk saja namun juga bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memahami syariah sehingga

¹⁵ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 136-137.

akan lebih dapat memaksimalkan operasional produk usaha, baik dalam proses pengeluaran maupun pelaksanaan produk di lapangan.

Selain dua lingkup tersebut, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa aktivitas kegiatan pengawasan DPS meliputi tiga hal yakni:¹⁶

- a. *Ex ante auditing*, yakni aktivitas pengawasan DPS yang dipusatkan pada pemeriksaan berbagai kebijakan yang diambil oleh LKS.
- b. *Ex post auditing*, yakni aktivitas pengawasan DPS yang dipusatkan pada pemeriksaan laporan kegiatan dan laporan keuangan.
- c. Perhitungan dan pembayaran zakat LKS, aktivitas ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariah tentang harta yang berbeda (*mal*) yang menjadi bagian kewajiban dari LKS.

Meskipun berbeda secara redaksional, kedua pendapat tersebut memiliki kesamaan yakni memusatkan pengawasan pada ruang lingkup SDM dan LKS yang berasas pada prinsip dan pelaksanaan syariah Islam.

Tujuan pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah untuk memeriksa kepatuhan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-perundangan. Sasaran pengawasan Koperasi adalah¹⁷:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 144.

¹⁷ Farid Hidayat, *op.cit*, hlm. 400-401.

- a. Terwujudnya peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;
- c. Terwujudnya Koperasi yang akuntabel.

Manfaat pengawasan bagi Koperasi adalah untuk mendorong koperasi agar:

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip Koperasi;
- 3) Dalam menjaga dan melindungi aset Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- 4) Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- 5) Menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;
- 6) Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi dari unsur pemerintah dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pengawas KSPPS dan USPPS Koperasi adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Deputy/Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang berwenang mengangkat pejabat pengawas untuk melakukan

pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai wilayah keanggotaanya.

Pengawas KPPS ini disebut Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh mu'amalat (*fiqh al-mu'amalat*). Namun, Dewan Pengawas Syari'ah bisa juga anggota diluar ahli fiqh, tetapi juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh mu'amalat. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syari'ah Islam.

Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 mengatakan pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin ke-9 mengatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Dalam keputusan DSN-MUI No.3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan pengawas Syariah diatur sebagai berikut:

1. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah
 - a. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota dewan pengawas syariah;
 - b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua;
 - c. Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.
2. Syarat Dewan Pengawas Syariah
 - a. Memiliki *akhlaq karimah*;
 - b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan /atau keuangan secara umum;
 - c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah;
 - d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Dalam keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam pasal 14 juga menerangkan tentang petunjuk pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan pengawas Syariah diatur sebagi berikut:

- a. Jumlah Dewan pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI;

- b. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syariah meliputi:
 - a) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan Negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - b) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus;
- c. Dewan pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.

Dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas diharapkan bahwa seseorang yang menjadi anggota DPS diharapkan mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga keuangan syari'ah, selain itu juga anggota DPS diharapkan untuk dapat berperan dalam pengembangan kinerja lembaga keuangan syari'ah dengan tetap mengacu dan berpedoman pada prinsip-prinsip syari'ah.

Tugas utama dewan pengawas syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN¹⁸.

Tugas Dewan pengawas Syariah yang tertulis dalam keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 13 adalah sebagai berikut:

¹⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2009, h. 142.

- a) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah;
- b) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
- c) Mengawasi pengembangan produk baru;
- d) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
- e) Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Dewan pengawas syariah merupakan istilah resmi yang digunakan di Indonesia. Di luar negeri, istilah tersebut berbeda-beda. Selain itu, jumlah anggota dewan pengawas syariah pun berbeda-beda. Wewenang Dewan Pengawas Syari'ah adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah, baik untuk pengerahan maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya;
- b) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijadikan dinilai bertentangan dengan syariah¹⁹.

Dari keberadaan tugas dan wewenang DPS secara tidak langsung menandakan bahwa DPS memiliki fungsi bagi KSPPS sebagai berikut:

- a) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada KSPPS;

¹⁹ Adrian Sutedi, *Ibid*, h. 143.

- b) Sebagai mediator antara KSPPS dan DSN.

Menurut keputusan DSN Nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada lembaga keuangan syariah, fungsi umum dewan pengawas syariah adalah:

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
- 2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN²⁰.

Lebih detail MUI menjelaskan fungsi DPS dalam Keputusan Dewan Pengawas MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya;
- b) Mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala LKS yang bersangkutan dan kepada DSN;
- c) Melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun;
- d) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN²¹.

²⁰ Adrian Sutedi, *Ibid*, h. 142.

²¹ Kuat Ismanto, *manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 117.

Apabila memperhatikan tanggung jawab tugas DPS yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa DPS memiliki peran yang unik dalam lingkup Lembaga Keuangan Syari'ah. Keunikan tersebut tidak lain adalah dua peran yang ada dalam diri DPS, yakni peran sebagai penjamin terlaksananya prinsip syari'ah dan peran sebagai pengawas operasional syari'ah oleh LKS.

2. Tahap-tahap Pengawasan DPS²²

Dalam melakukan pengawasan, DPS dapat melaksanakannya melalui tiga procedural pengawasan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Prosedur atau tahapan perencanaan pengawasan

Pada tahap ini DPS membuat rencana terkait dengan tahapan pengawasan yang akan dilaksanakannya. Tahap ini merupakan tahapan penting dan paling mendasar karena hasil dalam tahapan ini yang akan menjadi acuan dan pedoman DPS dalam melaksanakan pengawasan kepada LKS. Perencanaan pengawasan disesuaikan dengan ruang lingkup pengawasan DPS;

b. Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan

²² Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah : Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 114; terkait dengan pengertian DPS juga diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Lihat dalam Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 117-118.

Tahapan ini merupakan tahapan operasional dari tahapan pertama. Pada tahapan ini, DPS melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk memudahkan pengawasan, maka dalam tahapan ini DPS dapat melakukan salah satu bentuk pengawasan dengan melakukan peninjauan kertas kerja pemeriksaan.

c. Pendokumentasian kesimpulan dan laporan

Tahapan ini adalah tahap akhir yang merupakan tahapan pengarsipan yang perlu dilakukan oleh DPS. Hal ini penting agar setiap perkembangan pengawasan dapat dimonitoring sebagai bahan evaluasi kerja dan pertimbangan dalam menentukan model pengawasan yang akan dilakukan pada masa mendatang.

BAB III

PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA FORUM KOPERASI SYARIAH (FKS) DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BOJONEGORO

A. Profil Forum Komunikasi Syariah (FKS) Bojonegoro

1. Sejarah berdirinya Forum Koperasi Syariah (FKS)

Forum Koperasi Syariah (FKS) Jawa Timur lahir dari sebuah kesadaran untuk membuat wadah bersama bagi koperasi-koperasi syariah di Jawa Timur (BMT, BTM, Kopsyah, Kopontren, KJKS) baik koperasi skunder maupun primer dengan fungsi utama sebagai forum silaturahmi dan komunikasi dengan para stakeholder di wilayah Jawa Timur.

Forum Koperasi Syariah lahir pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 bertempat di R Arya Wiraatmaja Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Juanda No. 22 Sidoarjo¹.

Terpilih sebagai pengurus yang pertama dalam periode 2015-2018 adalah :

- 1) Ketua : Ali Hamdan
- 2) Sekertaris : H. Nyadin
- 3) Bendahara : Titin Umila
- 4) Ketua Bidang SDI : Sudirman Agus (Sekaligus Korwil Surabaya)

¹ www.fksjatim.go.id

- 5) Ketua Bidang Humas dan Kerjasama : H. Untung Hendro (Sekaligus Korwil Malang)
- 6) Ketua Bidang Advokasi dan Hukum : Anang Mahmdi ((Sekaligus Korwil Besuki)
- 7) Ketua Bidang Organisasi : Atok Sunu Prastowo (Sekaligus Korwil Madiun)
- 8) Ketua Bidang IT : H. Rahmanto Budi (Sekaligus Korwil Kediri)
- 9) Ketua Bidang Kepatuhan Syariah : H. Masyudi (Sekaligus Korwil Madura)
- 10) Ketua Bidang Baitulmaal : Moh. Wahyudi (Sekaligus Korwil Bojonegoro)².

2. VISI dan MISI FKS Jatim

Adapun visi misi dari Forum Koperasi Syariah Jawa Timur adalah:

- a. Visi FKS : **“ Terdepan dalam pengembangan Koperasi syariah di Jawa Timur dengan jejaring yang berkualitas”**
- b. Misi FKS
 1. Membangun Silaturahmi dan jejaring koperasi syariah di Jawa Timur yang unggul dan konsisten terhadap syariah;

² www.fksjatim.go.id

2. Mendukung dan memfasilitasi pengembangan Koperasi syariah di Jawa Timur dalam bentuk penguatan sumberdaya insan, manajerial dan financial;
 3. Menjalin hubungan kerja sama dengan stakeholder dengan prinsip saling menguntungkan³.
3. Program FKS JATIM
- Beberapa Program FKS Jatim diantaranya :
1. Membangun software / IT sebagai sarana komunikasi dalam bentuk WA, email dan web dengan target bulan Maret 2016 Web FKS Jatim selesai dan siap di launching;
 2. Mendorong dibentuknya kepengurusan FKS dimasing-masing wilayah Koordinator wialayah (diusahakan sampai dengan pengurus FKS Kabupaten /Kota) dengan target maret 2016 seluruh kepengurusan wilayah terbentuk;
 3. Pendaftaran anggota;
 4. Temu anggota / Kopdar per masing-masing karisidenan (target April 2016 dan Agustus 2016);
 5. Silaturahmi ke Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/Kota
 6. Usulan program edukasi (mandiri maupun kerjasama) :
 - i. Penangan pembiayaan bermasalah;
 - ii. Perpajakan;
 - iii. Pemasaran produk syariah;
 - iv. Akad-akad syariah;

³ www.fksjatim.go.id

- v. SKKNI;
 - vi. Manajemen Fraud;
 - vii. Strategi penghimpunan Dana;
 - viii. Pelatihan dasar Koperasi syariah;
 - ix. Optimalisasi baitulmaal pada Koperasi Syariah;
 - x. Pelatihan pengurus;
 - xi. Pelatihan dan sertifikasi Dewan pengawas Syariah (DPS).
7. Pelatihan khusus untuk upgrade Presidium :
- i. Manajemen Organisasi;
 - ii. Pelatihan IT;
 - iii. Upgrade Regulasi Koperasi Syariah.
8. Usulan Program Advokasi :
- i. Distribusi dan sosialisasi draft AD/ART KSPPS;
 - ii. Standarisasi akad syariah bagi KSPPS yang membutuhkan;
 - iii. Pendampingan bagi KSPPS yang membutuhkan PAD dan ijin usaha.
9. Usulan Program fasilitasi : Memfasilitasi kerjasama linkage dengan para stakeholder bagi KSPPS yang membutuhkan;
10. Melakukan aksi sosial “ FKS Peduli”⁴.
4. Kantor Bersama Dan Partner
- Partner utama Forum Koperasi Syariah Jawa Timur adalah : -
- 1) Dinas Koperasi dan UMKM Prop Jawa Timur;

⁴ www.fksjatim.go.id

- 2) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten / Kota Se Jawa Timur;
- 3) Lembaga Keuangan Syariah (perbankan, asuransi, dll);
- 4) Koperasi Syariah Sekunder dan Primer Se Jawa Timur.

**B. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
yang menjadi anggota FKS cabang Bojonegoro 2016**

No.	Daftar Anggota KSPPS pada FKS	
1.	Nama KSPPS	KSPPS Syariah BMT NU “Nurul Ummah” Ngasem
	Alamat	kantor pusat Jl. Raya kalitidu-Ngasem km. 09 Desa Bareng Ngaseng Bojonegoro.
	Tahun Berdiri	April 2012
	Badan Hukum	643/BH/XVI.4/2012
	Ketua Pengurus	Bpk. Wahyudi
	Jumlah cabang	12 cabang
	Jumlah karyawan	57 Orang
2.	Asset	20 M
	Nama KSPPS	BMT Kopsyah Bmt Fanshob Karya
	Alamat	jl. KH. Agus Salim No.77 kauman Bojonegoro
	Tahun Berdiri	januari 1999
	Badan Hukum	11/BH/KDK.13.27/XI/2000
	Ketua Pengurus	Drs. H. Abdul Syukur Mu'id
	Ketua Pengelola	Julia Hidayati, SE
	Jumlah cabang	1 cabang di Kedungadem
	Jumlah karyawan	3 orang
	Asset	Rp. 6.620.400.000
3.	Nama KSPPS	BTM kopwan BMT Dinar nasyiah 1

	Alamat	jl. Hasanudin no. 16 kauman bojonegoro
	Tahun Berdiri	Januari 2003
	Badan Hukum	518/11/PAD/412.38/2007
	Ketua Pengurus	Qomariyah, S.Ag
	Ketua Pengelola	Doris Habibatul Ilah
	Jumlah cabang	-
	Jumlah karyawan	3 orang
	Asset	2,6 M
4.	Nama KSPPS	BTM Dinar mulia
	Alamat	jl. MH Thamrin gg. Rukun 14 a Ledok Wetan
	Tahun Berdiri	2014
	Badan Hukum	786/BH/XVI.4/2015
	Ketua Pengurus	Muchlisotul Furda
	Ketua Pengelola	halimatuzzahroh
	Jumlah cabang	-
	Jumlah karyawan	1 Orang
	Asset	150 jt
5.	Nama KSPPS	KJKS BMT El- Wanita Fanshob
	Alamat	jl.KH. Agus Salim No.09 kauman Bojonegoro
	Tahun Berdiri	2008
	Badan Hukum	071/BHXVI.4/2009
	Ketua Pengurus	Lina Afifah Ahsani S.psi
	Ketua Pengelola	Julia Hidayati, SE
	Jumlah cabang	-
	Jumlah karyawan	2 Orang
	Asset	1 M
6.	Nama KSPPS	Koperasi Syariah BMT Amanah Bojonegoro

	Alamat	Jl. Letda Suraji 81 Bojonegoro
	Tahun Berdiri	Juni 2003
	Badan Hukum	518/04/BH/412.3./2006
	Ketua Pengurus	Moch. Suberi, SE,MM
	Ketua Pengelola	Wiwin ika siswanti, SE
	Jumlah cabang	-
	Jumlah karyawan	3 orang
	Asset	Rp. 238.353.295
7.	Nama KSPPS	Kopsyah BMT An Najah
	Alamat	Jl Serma kusman 40 Banjarejo Bojonegoro
	Tahun Berdiri	2009
	Badan Hukum	604/BH/XVI.4/2011
	Ketua Pengurus	Roiyah
	Ketua Pengelola	Tri Mayliswati
	Jumlah cabang	-
	Jumlah karyawan	2 orang
8.	Asset	300 jt
	Nama KSPPS	Kopsyah BTM Dinar Nasyiah 2
	Alamat	Jl. Raya no. 300 Sumberejo
	Tahun Berdiri	Desember 2006
	Badan Hukum	40/PAD/XVI.4/2011
	Ketua Pengurus	Siti Istinawati
	Ketua Pengelola	Sarpi
	Jumlah cabang	-
9.	Jumlah karyawan	2 Orang
	Asset	772 jt
	Nama KSPPS	Kopwan BTM Dinar Setia
	Alamat	Jl. Basuki Rahmat 60 Mojokampung Bojonegoro

	Tahun Berdiri	2008
	Badan Hukum	82/BH/XVI.4/2009
	Ketua Pengurus	Erni Megawati
	Ketua Pengelola	Insafitul Aminah
	Jumlah cabang	-
	Jumlah karyawan	2 Orang
	Asset	1,2 M
10.	Nama KSPPS	KJKS Akas Mandiri
	Alamat	Desa Sekar rt.01 rw.01 kec. Sekar Bojonegoro
	Tahun Berdiri	2011
	Badan Hukum	625/BH/XVI.4/2011
	Ketua Pengurus	Imam Nurozi
	Ketua Pengelola	Suhariyono
	Jumlah cabang	-
	Jumlah karyawan	3 Orang
	Asset	300 jt

C. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas pada KSPPS di Bojonegoro

Berdasarkan dari berbagai observasi dan wawancara penulis pada KSPPS yang ada di Bojonegoro dan tergabung dalam Forum Komunikasi Syariah diperoleh data bahwa tidak semua KSPPS ini mempunyai DPS yang sudah di tetapkan baik itu oleh fatwa DSN-MUI atau peraturan menteri koperasi. Di sana penulis melihat hanya ada beberapa KSPPS yang mempunyai DPS dan bahkan melebihi apa yang di tetapkan baik itu oleh fatwa DSN-MUI atau peraturan menteri koperasi yaitu memiliki 4 orang anggota DPS yang sudah memiliki sertifikat dari DSN-MUI, ada juga beberapa KSPPS yang

hanya mempunyai setengah dari apa yang ditetapkan baik itu oleh fatwa DSN-MUI atau peraturan menteri koperasi, dan bahkan ada yang tidak mempunyai satupun DPS yang mempunyai sertifikat dari DSN-MUI.

Tidak mudah menjadi Pengawas pada KSPPS, selain harus menjalankan tugasnya sebagai Pengawas dan bertanggung jawab terhadap RAT, Pengawas KSPPS juga harus melakukan pengawasan syariah dan melaporkannya dalam RAT. Oleh karena itu ada syarat dan ketentuan dalam pengangkatan Pengawas KSPPS.

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada RAT. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:⁵

1. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan koperasi;
2. Memiliki keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan dan pemeriksaan;
3. Jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
4. Pengawas koperasi simpan pinjam dan pembiayaan harus memenuhi persyaratan standard kompetensi;
5. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 tahun;
6. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan pengurus, pengawas, dan pengelola;

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Yudi , ketua Forum Komunikasi Syariah koordinator wilayah Bojonegoro pada Selasa, 07 Mei 2017 pukul 14:00 WIB

7. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
 8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan koperasi, keuangan Negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan;
 9. Pengawas koperasi dilarang merangkap jabatan menjadi pengawas, pengurus, dan pengelola pada primer koperasi lainnya.
- A. Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas KSPPS⁶
1. Tugas Pengawas
 - a. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus;
 - c. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.
 2. Kewajiban Pengawas
 - a. Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga;
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;

⁶ File KSPPS di Bojonegoro

- d. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada rapat anggota.

3. Hak Pengawas

- a. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi;
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. Memberikan koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada pengurus;
- d. Menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan rapat anggota.

4. Wewenang Pengawas

- a. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait;
- b. Mendapat laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus;
- c. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- d. Meminta bantuan kepada akuntan publik dan kepada tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan simpan, pinjam, dan pembiayaan audit keuangan dan audit non keuangan terhadap koperasi, yang penempatannya diputuskan oleh rapat anggota.

Selain memiliki tugas, kewajiban, hak, dan tanggungjawab sebagai seorang Pengawas KSPPS, Pengawas KSPPS juga

mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai seorang Pengawas Syariah. Tak jarang bahwa seorang pengawas ini mempunyai rangkap jabatan pada KSPPS yang diawasinya. Bahkan selama observasi penulis melihat bahwa ada beberapa DPS yang menjabat sebagai ketua pengelola dari KSPPS yang diawasinya.

D. Pelaksanaan Pengawasan Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah dan Mekanisme Pelaksanaanya Pada KSPPS di Bojonegoro

Di Bojonegoro masih ada KSPPS yang belum memiliki Dewan Pengawas Syariah namun juga ada KSPPS yang sudah memiliki DPS bahkan ada yang memiliki lebih dari dua DPS dalam satu KSPPS. Tugas lain dari DPS adalah membuat mekanisme proses pekerjaan pengawasan bertujuan agar pekerjaan yang diawasi menjadi berkualitas, seorang pengawas harus membuat uraian kegiatan rinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, yang secara garis besar . Adapun pembagian KSPPS yang belum memiliki KSPPS dan yang sudah memiliki KSPPS adalah secara berikut:

A) KSPPS yang belum memiliki DPS

- a. KSPPS BTM (Baitul Tamwil Muhamadiyah) Dinar Mulia
Menurut wawancara penulis dengan salah satu karyawan, KSPPS ini merupakan badan amal usaha milik salah satu organisasi di Indonesia yang berdiri pada tahun 2014, mekanisme pengawasanya belum ada karena masih

terbilang muda dibanding KSPPS dan/atau amal usaha milik organisasi muhamadiyah yang berada di Bojonegoro. Berikut adalah profil dari BTM Dinar Mulia

I. IDENTITAS KOPERASI			
1.	Nama Koperasi	:	Kopsyah BTM Dinar Mulia
2.	Nomor/ Tgl. Badan Hukum	:	786/8H/XVI.4/2015 tgl 03 September 2015
3.	Nomor/ Tgl. PAD	:	-
4.	Surat Ijin Usaha SP	:	08/XVI.4/518.3/XI/2015
5.	Alamat	:	
	• Jalan	:	Jl. Hasanuddin No. 16
	• Kecamatan	:	Bojonegoro
	• Kel./ Desa	:	Kauman
	• Kab./ Kota	:	Bojonegoro
6.	Telp. Kantor/ HP	:	085204920062
7.	E-mail	:	-
8.	Website	:	-
9.	Pengurus Koperasi	:	No. HP
	• Ketua	:	Muchlisotul Furda S,Pd 085646365956
	• Bendahara	:	Cebeng A. Ustadza 081330317671
	• Sekretaris	:	Yuni Asih 085523064940
10.	Pengawas Koperasi	:	
	• Ketua	:	Istiqial Fitri 081233255891
	• Anggota	:	Lina Afifah Achsani 08563181317
11.	Jumlah Anggota	:	91 Orang / 10 Lk, 81 Pr
12.	Jumlah Calon Anggota	:	-
13.	Manager	:	1 Orang / Perempuan
14.	Karyawan	:	1 Orang / Perempuan
15.	Jumlah Kantor Cabang	:	-

II. ASPEK KEUANGAN			
		Tahun Buku 2016	Tahun Buku 2015
1.	Simpanan Diterima	Rp. 358.596.825	Rp. 110.736.775
2.	Modal Pinjaman	Rp. 61.048.000	Rp. 35.585.000
3.	Modal Sendiri	Rp. 32.795.800	Rp. 17.323.500
4.	Modal Penyertaan	-	-
5.	Total Asset	Rp. 474.458.175	Rp. 176.405.550
6.	Pinjaman Diberikan	Rp. 373.430.500	Rp. 156.129.000
7.	Volume Usaha	Rp. 91.790.000	Rp. 48.188.500
8.	SHU	Rp. 16.036.450	Rp. 11.052.575
9.	Skoring Hasil Penilaian Kesehatan (Telah Dinilai Oleh Dinas)	-	-

Ketua Pengurus
Kopsyah BTM Dinar Mulia

Muchlisotul Furda S,Pd

B) KSPPS yang memiliki DPS

a. KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem

KSPPS ini termasuk KSPPS terbesar yang ada di Bojonegoro dan memiliki empat orang anggota DPS yang

memiliki sertifikat dari DSN-MUI yaitu bapak Moh. Wahyudi, bapak Moh. Mas'udi, bapak, Miftahul Anam, dan bapak Abdul Kharis

Mekanisme pelaksanaan pengawasan pada BMT Nurul Ummah Ngasem

- 1) Pekerjaan Persiapan
 - a. Menyusun program kerja dan konsepsi pekerjaan pengawasan.
- 2) Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan
 - a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan transaksi akad dengan nasabah agar pelaksanaan teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sesuai dengan prinsip syariah yang ada.
 - b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas semua produk-produk yang ditawarkan KSPPS selama pelaksanaan akad dilapangan atau ditempat kerja lainnya.
 - c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar akad-akad yang digunakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
 - d. Memberikan masukan pendapat teknis akad-akad dalam produk, untuk menjaga kesyariahnya.

- e. Memberikan petunjuk terkait pelaksanaan penggunaan akad-akad dalam produk.
 - f. Memberikan bantuan sehubungan dengan pelaksanaan praktik transaksi.
- 3) Konsultasi
- a. Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan para pengurus dan staf, dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan.
 - b. Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.
- 4) Laporan.
- a. Memberikan laporan dan pendapat teknis kepada pengurus KSPPS, mengenai praktik transaksi yang selama ini dilaksanakan.
 - b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata
 - c. Melaporkan akad-akad yang dipakai dengan setiap nasabah yang melakukan pembiayaan ataupun simpan pinjam.
 - d. Memeriksa praktik transaksi yang telah dilakukan dengan nasabah.

5) Dokumen.

- a. Mempersiapkan laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh DPS.

C) KJKS BMT El-Wanita Fansob

Menurut wawancara penulis mendapatkan fakta bahwa DPS di KSPPS tersebut juga merupakan karyawan di KSPPS tersebut sehingga pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap hari karena karyawan tersebut bekerja setiap hari melakukan pelayanan kepada setiap nasabah.

Mekanisme pelaksanaan pengawasan pada BMT El-Wanita Fansob

1) Pekerjaan Persiapan

- a) Menyusun program kerja dan konsepsi pekerjaan pengawasan.

2) Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan

- a) Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan transaksi akad dengan nasabah agar pelaksanaan teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sesuai dengan prinsip syariah yang ada.
- b) Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas semua produk-produk yang ditawarkan KSPPS selama pelaksanaan akad dilapangan atau ditempat kerja lainnya.

- c) Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar akad-akad yang digunakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
 - d) Memberikan masukan pendapat teknis akad-akad dalam produk, untuk menjaga kesyariahnya.
 - e) Memberikan petunjuk terkait pelaksanaan penggunaan akad-akad dalam produk.
 - f) Memberikan bantuan sehubungan dengan pelaksanaan praktik transaksi.
- 3) Konsultasi
- a) Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan para pengurus dan staf, dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan.
 - b) Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.
- 4) Laporan.
- a) Memberikan laporan dan pendapat teknis kepada pengurus KSPPS, mengenai praktik transaksi yang selama ini dilaksanakan.
 - b) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata
 - c) Melaporkan akad-akad yang dipakai dengan setiap nasabah yang melakukan pembiayaan ataupun simpan pinjam.

- d) Memeriksa praktik transaksi yang telah dilakukan dengan nasabah.
- 5) Dokumen.
 - a) Mempersiapkan laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh DPS.

D) KSPPS BMT Akas Mandiri

Menurut wawancara penulis lakukan DPS dari KSPPS BMT Akas Mandiri ini melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali.

Mekanisme pelaksanaan pengawasan pada KSPPS BMT Akas Mandiri

- 1) Pekerjaan Persiapan
 - a) Menyusun program kerja dan konsepsi pekerjaan pengawasan.
- 2) Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan
 - a) Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan transaksi akad dengan nasabah agar pelaksanaan teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sesuai dengan prinsip syariah yang ada.
 - b) Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas semua produk-produk yang ditawarkan KSPPS selama pelaksanaan akad dilapangan atau ditempat kerja lainnya.

- c) Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar akad-akad yang digunakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
 - d) Memberikan masukan pendapat teknis akad-akad dalam produk, untuk menjaga kesyariahnya.
 - e) Memberikan petunjuk terkait pelaksanaan penggunaan akad-akad dalam produk.
 - f) Memberikan bantuan sehubungan dengan pelaksanaan praktik transaksi.
- 3) Konsultasi
- a) Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan para pengurus dan staf, dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan.
 - b) Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.
- 4) Laporan.
- a) Memberikan laporan dan pendapat teknis kepada pengurus KSPPS, mengenai praktik transaksi yang selama ini dilaksanakan.
 - b) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata
 - c) Melaporkan akad-akad yang dipakai dengan setiap nasabah yang melakukan pembiayaan ataupun simpan pinjam.

d) Memeriksa praktik transaksi yang telah dilakukan dengan nasabah.

5) Dokumen.

a) Mempersiapkan laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh DPS.

E) KSPPS BTM Dinar Nasiah 1

Menurut wawancara penulis dengan salah satu karyawan, DPS memberikan arahan tentang bagaimana seharusnya akad di tulis sesuai dengan ketentuan DSN-MUI, setelah itu DPS tidak pernah melakukan pengawasan di kantor baik secara langsung maupun tidak, dan tidak jauh beda dengan Dinar Nasyah 2, karena termasuk cabang dari BTM Dinar Nasiah 1 dan badan amal usaha milik salah satu organisasi di Indonesia.

F) KSPPS BTM Dinat Setia

Menurut wawancara penulis dengan salah satu karyawan KSPPS ini memiliki DPS namun tugas DPS hanya berjalan pada awal setelah tes ataupun perekrutan DPS yang diadakan oleh MUI, dan selama ini jika ada masalah ataupun karyawan ingin menanyakan sesuatu maka karyawan menghubungi DPS via telephon atau bertemu langsung, selama ini DPS belum pernah melakukan pengawasan atau bekerja di kantor KSPPS karena alasan kesibukan dari DPS tersebut.

G) KSPPS BMT Fanshob Karya

Menurut wawancara penulis dengan salah satu karyawan KSPPS, walaupun KSPPS memiliki DPS namun para DPS ini tidak melakukan pengawar ataupun bekerja di kantor KSPPS secara berkala dan langsung, karena kesibukan dari masing-masing DPS dan kendala jarak antara rumah DPS dan kantor KSPPS tersebut. Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan pengawasan secara langsung, pihak BMT menjamin bahwa akad-akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ada.

H) BMT Amanah

Menurut wawancara penulis dengan salah satu karyawan KSPPS dan tidak jauh beda dengan KSPPS yang lain, KSPPS ini juga memiliki DPS sendiri, dan DPS hanya memberikan petunjuk terkait pelaksanaan penggunaan akad-akad dalam produk pada awal penunjukan sebagai DPS, serta memberikan bantuan sehubungan dengan pelaksanaan praktik transaksi jika karyawan membutuhkan bantuan dari DPS, karena DPS memiliki kesibukan sendiri.

BAB IV

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH DI BOJONEGORO

A. Analisis implementasi peran dan fungsi Dewan pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS di Bojonegoro

Pada prinsipnya, seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun, mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya¹. Kredibilitas suatu lembaga keuangan syari'ah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholders lembaga keuangan syari'ah.

Dewan Pengawas Syariah dibutuhkan keberadaanya dalam setiap KSPPS. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan tentang pengawasan koperasi yaitu upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat agar organisasi dan usaha KSPPS dan

¹ Adrian Sutedi, *Ibid*, h. 143.

USPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada anggota DPS yang melakukan pengawasan di KSPPS diperoleh hasil yang berbeda namun banyak yang hampir serupa antara satu jawaban dengan jawaban lainnya dari masing-masing informan.

Pada KSPPS yang ada di Bojonegoro banyak yang sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah bersertifikat DSN-MUI namun pelaksanaan tugas atau menjalankan fungsinya sebagai seorang DPS belum maksimal atau bisa dikatakan tidak berjalan. Serta ada KSPPS yang tidak mempunyai DPS. Namun ada juga KSPPS yang sudah memiliki DPS dan melakukan fungsi, tugas, serta wewenanganya sebagai seorang DPS tentunya berdasarkan fatwa DSN-MUI No.3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan pengawas Syariah.

Dalam penerapan pelaksanaan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah pada KSPPS yang ada di Bojonegoro khususnya yang tergabung dalam Forum Koperasi Syariah (FKS) harus menggunakan keputusan DSN-MUI No.3 tahun 2000 tentang

²Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan pengawas Syariah diatur sebagai berikut:

1. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah
 - a. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota dewan pengawas syariah;
 - b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua;
 - c. Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.
2. Syarat Dewan Pengawas Syariah
 - a. Memiliki *akhlaq karimah*;
 - b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan /atau keuangan secara umum;
 - c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah;
 - d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Dalam keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam pasal 14 juga menerangkan tentang petunjuk pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan pengawas Syariah diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah Dewan pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI;
- b. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syariah meliputi:
 - a) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan Negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - b) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus;
- c. Dewan pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.

Dilihat dari ketentuan diatas maka setiap KSPPS harus memiliki 2 orang DPS dan salah satunya harus memilikis sertifikat dari DSN-MUI, namun dalam KSPPS yang ada di Bojonegoro yang mempunyai DPS berjumlah 5 orang, 4 diantaranya mempunyai sertifikat DSN-MUI hanya satu KSPPS, karena BMT ini merupakan BMT pusat dan BMT terbesar yang ada di Bojonegoro jadi tidak mengherankan jika KSPPS tersebut mempunyai DPS lebih dari yang di syartakan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI N0. 16/ Per/ M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Selain itu KSPPS yang ada di Bojonegoro rata-rata hanya memiliki satu DPS bersertifikat DSN-MUI, bahkan ada KSPPS yang tidak memiliki satupun DPS dalam KSPPSnya, karena beralasan DPS.nya masih ikut pada KSPPS lain karena masih satu cabang, padahal jelas-jelas nama dari KSPPS tersebut sudah berbeda dan mempunyai nomor pendaftaran yang berbeda juga.

Kemudian menurut keputusan DSN-MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada lembaga keuangan syariah, fungsi umum dewan pengawas syariah adalah:

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
- 2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN³.

Tugas Dewan pengawas Syariah yang tertulis dalam keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah;

³ Adrian Sutedi, *Ibid*, h. 142.

- b) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
- c) Mengawasi pengembangan produk baru;
- d) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
- e) Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Dewan pengawas syariah merupakan istilah resmi yang digunakan di Indonesia. Di luar negeri, istilah tersebut berbeda-beda. Selain itu, jumlah anggota dewan pengawas syariah pun berbeda-beda. Wewenang Dewan Pengawas Syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah, baik untuk pengerahan maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya;
- b. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijadikan dinilai bertentangan dengan syariah⁴.

Dari keberadaan tugas dan wewenang DPS secara tidak langsung menandakan bahwa DPS memiliki fungsi bagi KSPPS sebagai berikut:

- a) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada KSPPS;
- b) Sebagai mediator antara KSPPS dan DSN.

Jika melihat dari pemaparan diatas, DPS harus melakukan tugas, fungsi dan wewenang yang sudah ditulis dalam peraturan

⁴ Adrian Sutedi, *Ibid*, h. 143.

tersebut. Dalam KSPPS yang berada di Bojonegoro yang sudah memiliki DPS dalam struktur organisasinya namun hanya melakukan pengawasan/berada di kantor KSPPS pada awal setelah dilantik dan diresmikan menjadi DPS oleh DSN-MUI walaupun para DPS ini memenuhi kriteria menjadi DPS seperti memahami ilmu ekonomi, memahami syariat Islam, bahkan bisa menggabungkan ilmu ekonomi dan syariat Islam untuk melakukan pengawasan. Namun karena banyaknya aktifitas dan kesibukan beliau-beliau sehingga tidak bisa melakukan pengawasan pada KSPPS yang telah menunjuknya menjadi DPS.

Walaupun ada KSPPS yang sudah memiliki DPS bersertifikat DSN-MUI dalam struktur organisasinya namun menurut ketua pengelola pengawasan DPS tidak berjalan dengan semestinya karena pihak KSPPS merasa kesulitan menemukan seseorang yang mampu untuk dijadikan seorang DPS, karena selain seseorang itu harus memahami ilmu ekonomi orang tersebut juga harus mampu memahami syariat Islam, dan tentunya menggabungkan ilmu ekonomi dan syariat Islam agar nantinya akad-akad yang digunakan dalam produk KSPPS tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun kebanyakan ulama yang ditemui hanya memahami hukum Islam saja dan tidak mampu mengimplementasikannya dalam ekonomi syariah. Dan para sarjana ekonomi tidak memahami syariat Islam, hal ini yang akhirnya membuat KSPPS merasa kesulitan

menemuka calon yang cocok untuk dijadikan DPS di KSPPS tersebut.

Berikut pemaparan fungsi dan peran pengawasan oleh DPS pada KSPPS yang masuk dalam FKS harus sesuai dengan keputusan DSN MUI no. 3 tahun 2000 dan keputusan Dewan Pengawas MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 :

1. Dewan Pengaws Syariah KSPPS BMT NU “Nurul Ummah” Ngasem:
 - a. Tidak memberikan nasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
 - b. Tidak melakukan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.
 - c. Tidak melakukan pengawasan secara periodic pada LKS yang berada di bawah pengawasanya;
 - d. Tidak mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala LKS yang bersangkutan dan kepada DSN;
 - e. Tidak melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun;
 - f. Tidak merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN

2. Dewan Pengaws Syariah KSPPS BMT Kopsyah Bmt Fanshob Karya
 - a. Tidak memberikan nasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
 - b. Tidak melakukan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.
 - c. Tidak melakukan pengawasan secara periodic pada LKS yang berada di bawah pengawasannya;
 - d. Tidak mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala LKS yang bersangkutan dan kepada DSN;
 - e. Tidak melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun;
 - f. Tidak merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN
3. Dewan Pengaws Syariah KSPPS BMT kopwan BMT Dinar nasyiah 1
 - a. Tidak memberikan nasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;

- b. Tidak melakukan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.
 - c. Tidak melakukan pengawasan secara periodic pada LKS yang berada di bawah pengawasannya;
 - d. Tidak mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala LKS yang bersangkutan dan kepada DSN;
 - e. Tidak melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun;
 - f. Tidak merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN
4. Dewan Pengaws Syariah KSPPS BMT Akas Mandiri
- a. Tidak memberikan nasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
 - b. Tidak melakukan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.
 - c. Tidak melakukan pengawasan secara periodic pada LKS yang berada di bawah pengawasannya;

- d. Tidak mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala LKS yang bersangkutan dan kepada DSN;
 - e. Tidak melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun;
 - f. Tidak merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN
5. Dewan Pengaws Syariah KSPPS BMT El- Wanita Fanshob
- a. Tidak memberikan nasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
 - b. Tidak melakukan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.
 - c. Tidak melakukan pengawasan secara periodic pada LKS yang berada di bawah pengawasanya;
 - d. Tidak mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala LKS yang bersangkutan dan kepada DSN;
 - e. Tidak melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun;
 - f. Tidak merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN.
6. Dewan Pengaws Syariah KSPPS BMT Amanah Bojonegoro

- a. Tidak memberikan nasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
 - b. Tidak melakukan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.
 - c. Tidak melakukan pengawasan secara periodic pada LKS yang berada di bawah pengawasannya;
 - d. Tidak mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala LKS yang bersangkutan dan kepada DSN;
 - e. Tidak melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun;
 - f. Tidak merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN.
7. Dewan Pengaws Syariah KSPPS BMT An Najah
- a. Tidak memberikan nasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
 - b. Tidak melakukan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan

saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.

- c. Tidak melakukan pengawasan secara periodic pada LKS yang berada di bawah pengawasannya;
- d. Tidak mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala LKS yang bersangkutan dan kepada DSN;
- e. Tidak melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun;
- f. Tidak merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN

8. Dewan Pengaws Syariah KSPPS BMT Dinar Nasyiah 2

- a. Tidak memberikan nasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
- b. Tidak melakukan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.
- c. Tidak melakukan pengawasan secara periodic pada LKS yang berada di bawah pengawasannya;
- d. Tidak mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala LKS yang bersangkutan dan kepada DSN;

- e. Tidak melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun;
 - f. Tidak merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN
9. Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT Dinar Setia
- a. Tidak memberikan nasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
 - b. Tidak melakukan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.
 - c. Tidak melakukan pengawasan secara periodic pada LKS yang berada di bawah pengawasannya;
 - d. Tidak mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala LKS yang bersangkutan dan kepada DSN;
 - e. Tidak melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun;
 - f. Tidak merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN.

Menurut hemat penulis apabila pemeriksaan dilakukan secara mendadak, maka hasil pemeriksaan yang di dapatkan adalah yang sebenarnya terjadi yang memang sudah dilakukan setiap hari dan

menjadi kebiasaan, bukan hal yang *disetting* hanya untuk hari itu saja. Dan juga apabila pemeriksaan dilakukan mendadak maka akan memotivasi pengelola untuk professional. Sebab dengan bekerja secara professional, maka jika ada audit syariah pengelola tidak akan mengalami kesulitan karena semuanya telah dilaksanakan dengan baik dan pengelolaan akan senantiasa siap untuk menyediakan objek yang akan diaudit secara mendadak.

Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan⁵. Tujuan pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah untuk memeriksa kepatuhan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-perundangan. Sasaran pengawasan Koperasi adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;
- c. Terwujudnya Koperasi yang akuntabel.

Manfaat pengawasan bagi Koperasi adalah untuk mendorong koperasi agar:

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

⁵ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

- 2) Sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip koperasi;
- 3) Dalam menjaga dan melindungi aset Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- 4) Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- 5) Menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;
- 6) Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada KSPPS, dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sistem pengawasan syariah yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan yang menjadi bagian dari ajaran Islam, yakni yang pertama *jalbul masha'lih* atau upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan. Kedua, *dar'ul mafasid* atau upaya untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material, dan ketiga adalah *saddudz dzari'ah* atau upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya.

Pengawasan syariah bagi KSPPS mempunyai nilai urgensi yang tinggi, karena perkembangan jenis transaksi keuangan dan aktifitas perdagangan yang begitu cepat dan beragam, membutuhkan penyikapan yang cepat dan tepat untuk memastikan sisi legalitas syariahnya. Lembaga Pengawasan Syariah tertinggi yang dalam hal ini DSN-MUI bertugas mengeluarkan Fatwa-Fatwa untuk memberikan solusi alternatif akad-akad syariah yang paling memungkinkan dilakukan. Tanpa adanya fatwa-fatwa kontemporer yang dikeluarkan DSN-MUI, maka yang terjadi adalah ekonomi syariah akan dilekatkan dengan citra ketinggalan jaman karena produk-produknya tidak berkembang dan tidak mampu menjawab kebutuhan zaman.

Dengan demikian, tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Karena memiliki DPS bagi KSPPS adalah suatu kewajiban yang tentu tidak bisa di tawar lagi. Kewajiban memiliki DPS ini telah dikemukakan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI N0. 16/ Per/ M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi pada BAB IV Bagian Ketiga mengenai Dewan Pengawas Syariah. Disini dijelaskan bahwa sebuah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha

simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.⁶

Hal ini menjelaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam sebuah KSPPS adalah hal yang wajib adanya sehingga ketika sebuah KSPPS tidak memiliki DPS berarti KSPPS tersebut telah melakukan penyelewengan terhadap peraturan tersebut.

Selain kewajiban memiliki DPS dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai syarat dan tugas-tugas DPS dalam menjalankan pengawasan. Dalam peraturan tersebut diterangkan bahwa Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dimana setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.

Sertifikasi DSN-MUI adalah hal yang sangat penting karena memiliki sertifikasi adalah suatu bukti bahwa seseorang mampu dan layak untuk menjadi seorang DPS, dimana kemampuannya tersebut sudah diuji oleh DSN-MUI melalui pelatihan dan ujian sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka menurut penulis harusnya pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas KSPPS untuk menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah dilakukan secara menyeluruh, meliputi:

1. Pengawasan prefentif yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi,

⁶ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI N0. 16/ Per/ M.KUKM/ IX/ 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

2. Pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari prinsip syariah,
3. Pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen,
4. Pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.

Dari sekian banyak sistem pengawasan, yang paling mendasar menurut penulis adalah terletak pada pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola KSPPS tersebut, karena dari sanalah pelaksanaan atau penyimpangan terjadi. Pengawasan syariah yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum dalam hal ini Pengawas KSPPS tidak cukup untuk menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah, karena tidak setiap saat Pengawas KSPPS dapat mengawasi. Namun pengawasan hati nurani yang telah terbina oleh keyakinan yang kuat akan adanya Allah SWT akan melahirkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan aktif, karena keyakinan tersebut menimbulkan keyakinan yang kuat juga terhadap firman Allah SWT dalam surat An Nisaa' ayat 1:

.... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“....Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”⁷

⁷ Departemen Agama RI, 2009, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Rilis grafika, hlm. 77.

Kepercayaan akan pengawasan Allah tersebut akan menimbulkan pengawasan hati nurani yang dapat lebih mampu mencegah penyelewengan kegiatan ekonomi jika dibandingkan dengan pengawasan dari luar. Pengawasan berbasis moral pada individu ini akan mendorong para pelaku KSPPS memiliki basis moral yang positif, sehingga menimbulkan motivasi pengawasan dari dalam, yang meskipun tidak diawasi oleh orang lain atau suatu badan yang berwenang, mereka tidak akan melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah sekecil apapun, karena keyakinan yang kuat bahwa Allah SWT tidak sedetik pun lepas dari pengawasannya, bahkan mengawasi apa yang ada dalam hati manusia.

Oleh karena itu semua insan KSPPS sebagai pelaku bisnis syariah harus di dorong agar memiliki aqidah yang kuat, untuk mencapai kondisi tersebut manajemen dan budaya kerja di KSPPS harus mampu mendukung terciptanya spiritualitas pada masing-masing individu. Setiap individu KSPPS harus memiliki kesucian jiwa dan kesadaran akan pengawasan dari Allah. Dibutuhkan kejujuran untuk mampu bertindak sesuai dengan kata hati nuraninya, karena suara hati nurani menjadi pembisik kebenaran. Sedangkan kesadaran pengawasan dari Allah merupakan benteng paling kuat untuk menahan diri ketika para pelaku bisnis KSPPS mendapatkan peluang untuk melakukan pelanggaran, sementara manajemen atau pengawas tidak mampu mendeteksinya.

B. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS di Bojonegoro

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan terkadang selalu saja ada faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yang dialami. Begitu juga dengan pengawasan-pengawasan syariah yang dilakukan oleh para anggota DPS pada KSPPS yang diawasinya. Berikut ini adalah hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui wawancara kepada para informan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses pengawasan syariah yang dilakukan oleh para anggota DPS pada KSPPS.

Faktor yang mempengaruhi kinerja DPS adalah DPS itu sendiri, karena tidak semua Dewan Pengawas Syariah mempunyai keilmuan sesuai dengan kriteria yang harus dimiliki. Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter misalnya, dampak bunga terhadap investasi, produksi, *unemployment*. Karena pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi. Harus diakui, bahwa perbankan syariah sangat rentan

terhadap kesalahan- kesalahan yang bersifat syariah. Pada penelitian ini dimungkinkan bahwa laporan keuangan KSPPS telah sesuai dengan syariat islam, namun Auditor DPS tidak memiliki akses yang cukup ke semua dokumen dan catatan yang mereka butuhkan dalam melaksanakan tugas mereka sebagai DPS.

Dewan pengawas syariah biasanya hanya mempunyai pendidikan pada hukum Islam saja dan tidak mempunyai pendidikan yang cukup pada pengetahuan umum (sekuler)⁸. Disamping itu, dengan tingkat pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anggota dewan pengawas syariah, maka dewan pengawas syariah dapat memilih dan memastikan apakah suatu peraturan dapat dilakukan dan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Lebih dari itu, dengan pendidikan tinggi yang dimiliki oleh anggota dewan pengawas syariah maka ia dapat mengaplikasikan kemampuan teori yang dimiliki kedalam peraturan syariah. Pada akhirnya anggota dewan pengawas syariah yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan turut memberikan peraturan yang lebih ketat terhadap ketaatan prinsip syariah.

Kemudian keterpandangan dewan pengawas syariah. Para sarjana yang memiliki pendidikan mengenai Islam juga mempunyai pengetahuan mengenai hukum Islam. Tetapi mereka tetap tidak memiliki kualifikasi yang cukup dalam institusi pendidikan umum

⁸Farook, S., M.K. Hassan, dan R. Lanis. 2011. "Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol. 2. No. 2. Hal. 114-141.

(sekular). Hussain dan Mallin melaporkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja direksi pada perusahaan di Bahrain adalah kemampuan, pengalaman bisnis dan keterpandangannya⁹. Berdasarkan alasan itu, terpandangnya seseorang adalah sebuah proxy pada perusahaan dan keterpandangan anggota dewan pengawas syariah sangat relevan dengan syariah dan bisnis yang direpresentasikan dengan perbankan syariah dan peraturan perbankan syariah. Keterpandangan atau reputasi anggota dewan pengawas syariah dapat menandakan bahwasanya dewan pengawas syariah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup mengenai prinsip syariah dalam ekonomi. Hal ini dikarenakan anggota dewan pengawas syariah yang memiliki keterpandangan ikut tergabung menjadi pengurus didalam organisasi-organisasi yang besar yang konsen terhadap prinsip syariah. Serta anggota dewan pengawas syariah juga bekerja pada perbankan syariah lain yang menandakan bahwa ia kompeten dan memiliki kualitas yang baik.

Pada KSPPS yang berada di Bojonegoro, DPS belum sepenuhnya memenuhi kriteria menjadi DPS, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan yang hanya mengetahui tentang hukum Islam/ syariat Islam saja, walaupun banyak DPS yang terpandang dalam masyarakat dan kemampuan dalam bidang syariat Islam sangat bagus namun masih ada sebagian DPS yang penguasaan

⁹ Hussain, S.H. dan C. Mallin. 2003. "The dynamics of corporate governance in Bahrain: structure, responsibilities and operation of corporate boards". *Corporate Governance: An International Review*. Vol. 11. No. 3. Hal. 249-262.

bisnisnya masih kurang karena kebanyakan profesi dari mereka adalah sebagai tenaga didik dan tidak mengetahui dunia bisnis.

Alasan lain kenapa masih minim sekali dps-dps yang mempunyai sertifikat DSN-MUI selain proses dan tes yang harus dilakukan begitu sulit dan rumit, kendala lain adalah biaya yang bisa dikatakan tidak sedikit.

“Saya tes di Surabaya secara kolektif yang diadakan oleh MUI selama 3 hari, dan membayar sebesar Rp. 2.000.000,- mungkin itu digunakan untuk membayar hotel dan makan selama 3 hari, modul-modul dari MUI kurang lebih seperti itu. Sebelum melakukan tes kami mengikuti seminar pembekalan tentang DPS oleh MUI”¹⁰.

Kemudian faktor lain yang menghambat kinerja pengawasan DPS yang tidak lain adalah faktor kesibukan dari DPS itu sendiri, banyak kegiatan-kegiatan dan profesi lain yang dilakukan oleh DPS sehingga beliau tidak melaksanakan pengawasannya dengan maksimal.

Faktor lain adalah pihak KSPPS ini tidak menyediakan ruangan khusus didalam kantor KSPPS untuk DPS agar DPS mudah melakukan kinerjanya sebagai DPS. Selain itu DPS tidak mendapatkan gaji tersendiri oleh KSPPS yang berada pada pengawanya.

¹⁰ Wawancara tanggal 23 Mei 2017 dengan bapak SB.

Dalam hasil *observasi* yang saya temui, semua anggota DPS ini adalah ketua atau pimpinan dalam KSPPS tersebut karena KSPPS tidak perlu mengeluarkan gaji *double* hanya untuk satu orang walaupun rangkap jabatan atau *double job* dalam KSPPS tersebut dan rata-rata KSPPS ini tidak mengambil DPS dari orang luar, salah satunya karena faktor gaji, jika KSPPS mengambil DPS dari orang luar atau tidak menjabat dalam KSPPS tersebut maka KSPPS harus memikirkan dan mengeluarkan anggaran lebih untuk menggaji DPS tersebut selain itu juga tidak perlu menyediakan kantor atau ruangan khusus untuk DPS tersebut. Dan KSPPS yang mengangkat DPS dari luar atau bukan orang yang menjabat dalam KSPPS juga tidak memberikan gaji yang intensif kepada DPS, oleh karena itu DPS enggan melakukan pengawasan karena kinerjanya tidak diapresiasi dengan benar.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi pelaksanaan fungsi, tugas maupun wewenang DPS dalam melakukan pengawasan di KSPPS. Karena para DPS tidak diperlakukan dengan baik atau tidak mendapat pelayanan baik dalam KSPPS sehingga mempengaruhi kinerjanya sebagai pengawas/ DPS. Sehingga DPS tidak bisa menjalankan fatwa DSN-MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada lembaga keuangan syariah dengan baik.

Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi koperasi konvensional dan koperasi syariah adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada koperasi syariah. Sedangkan di koperasi konvensional tidak ada aturan yang demikian. Dewan pengawas syariah merupakan satu dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqh mu'amalah (*Islamic commercial jurisprudence*) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional bank dan semua produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dewan pengawas syariah (*The Shari'a Supervisory Board*) mesti melihat secara teliti bagaimana bentuk-bentuk perikatan / akad (*agreements, appointment and engagement*) yang dilaksanakan oleh institusi keuangan syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis secara komprehensif, dan telah memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul **“Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS (Studi kasus di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro”** maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS yang berada di Bojonegoro ada beberapa yang sudah memiliki DPS sendiri, ada juga yang belum memiliki satupun DPS yang memiliki sertifikat dari DSN-MUI, namun ada KSPPS yang memiliki DPS lebih dari yang di syartkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yaitu memiliki lima orang anggota DPS sekaligus yang mendapatkan sertifikat dari DSN-MUI. Walaupun sudah memiliki DPS pada KSPPSnya tidak menjamin DPS tersebut bekerja atau melakukan pengawasan pada KSPPS tersebut, rata-rata keberadaan DPS hanya sebagai pelengkap saja pada bagan struktur organisasi, DPS yang berada di Bojonegoro belum sepenuhnya efektif melakukan tugas dan kewajibanya sebagai seorang DPS.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya kinerja DPS kurang begitu efektif. *Pertama*, karena kurangnya kesadaran dari pihak pengurus ataupun pengelola KSPPS bagaimana pentingnya peran DPS untuk KSPPS tersebut *Kedua*, karena pihak KSPPS tidak menyediakan ruangan khusus untuk DPS sendiri itu bekerja dan melakukan hak serta kewajiban yang di emban sebagai DPS untuk mengawasi bagaimana jalan kerja KSPPS tersebut. *Ketiga*, tidak ada gaji intensif setiap bulanya baik dari pihak KSPPS ataupun pihak MUI, karena DPS di bentuk dan disahkan oleh MUI, seharusnya MUI juga ikut bertanggung jawab atas gaji DPS, karena itu para DPS ini enggan untuk melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. *Keempat*, karena tidak ada payung khusus atau organisasi khusus untuk menaungi seluruh DPS yang ada di Bojonegoro, agar bisa melakukan berbagai informasi ataupun berbagi saran-saran untuk memperbaiki kinerja DPS yang selama ini dilakukan oleh masing-masing DPS di berbagai KSPPS yang ada di Bojonegoro. *Kelima*, tidak adanya pengawasan secara langsung/berkala oleh DSN MUI bagaimana DPS itu bekerja dan/atau melakukan hak dan kewajibanya sebagai DPS.

B. Saran- saran

1. Mengingat tugas Dewan Pengawas Syariah salah satunya adalah untuk mengawasi bagaimana terlaksananya sebuah akad dalam KSPPS tersebut, seyogyanya pihak KSPPS memberikan ruang

kerja tersendiri yang nyaman dan memadai agar para anggota DPS bisa bekerja dan menjalankan tugasnya dengan semestinya dan memberikan gajinya sebagai DPS pada KSPPS tersebut diluar gaji mereka sebagai jabatan inti atau anggota dalam KSPPS itu.

2. Mengingat adanya *double job* atau rangkap jabatan dalam mengawasi KSPPS, atau bisa di katakana 1 orang DPS mengawasi lebih dari 1 KSPPS, alangkah lebih baiknya jika KSPPS mengerjakan DPS ini hanya untuk satu KSPPS agar hasil kerja DPS ini lebih nyata dan lebih fokus lagi untuk melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan KSPPS.
3. Mengingat Bojonegoro merupakan kota yang akses jalanya masih belum bagus dan dalam sistem pengawasan syariah di kantor cabang dan kantor pusat cukup jauh dan akses yang tidak begitu memadai, sehingga tidak memungkinkan DPS pusat untuk memeriksa seluruh cabang dan alangkah lebih baik jika kantor cabang tersebut mempunyai DPS sendiri agar kegiatan dalam KSPPS tersebut bisa terpantau dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
4. Mengingat DPS juga melakukan sebuah pekerjaan seharusnya harus di beri imbalan berupa gaji intensif setiap bulanya, baik oleh pihak KSPPS ataupun pihak MUI yang telah menunjuk, mengesahkan dan melantik seorang itu menjadi DPS.

C. Penutup

Dengan ucapan Alhamdulillah telah selesai penyusunan serta pembahasan skripsi ini,. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, baik dalam isi, sistematika maupun dalam bahasa dan penyajian. Hal tersebut dikarenakan penulis masih dalam tahap proses belajar. Maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Akhirnya tidak ada kata yang layak terucap kecuali ungkapan hati, semoga karya tulis (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta bagi siapa saja yang kompeten dalam permasalahan ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung, 2013, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Albar, Muhamad Tahun 2011-2012, *Pengertian Implementasi menurut Para Ahli* (Online), <http://www.jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html>, diakses 18 Juli 2012
- Anggota IKAPI, 2009, *Perbankan syariah dalam Sistem Perbankan nasional*, Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Arofah, Anik, 2008 *Peran dewan pengawas syariah terhadap pengawasan aspek syariah di baitul maal wa tamwil (bmt) Safinah Klaten*, Surakarta: Fakultas Syariah, Universitas Sebelas Maret.
- Berderma untuk semua (wacana dan praktik filantropi Islam), 2003, PT.Mizan Publika.
- Bungin, Burhan, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, serta Ilmu-ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Damanuri, Aji, 2010, *Metode penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po Press.
- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Rilis grafika.
- Farook, S., M.K. Hassan, dan R. Lanis. 2011. "Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol. 2. No. 2.
- Herdiansyah, Haris, 2013, *Wawancara observasi dan Focus Groups*, Depok: Raja Grafindo Persada.

<http://subkhan.wordpress.com>, 2008

Hussain, S.H. dan C. Mallin. 2003. "The dynamics of corporate governance in Bahrain: structure, responsibilities and operation of corporate boards". Corporate Governance: An International Review. Vol. 11. No. 3.

Ismanto, Kuat, 2009, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kristin , Ari P, 2007, *Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Walisongo Semarang Volume XVIII/ Edisi I/ April 2007*. Semarang: Jurnal ahkam.

Kurniawan, Aris 14 November 2015, *Pengertian Implementasi (Online)*, <http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/>, di akses 02 Juni 2017

Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Keadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1984, *Qualitatif Data Analisis*, London: Sage Publication.

Munawwir, Ahmad Warson, 1984, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Nasution, S, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Transito.

Noor, Juliansyah, 2014, *Metodologi Penelitian*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Nurhasanah, Neneng, 2011 Jurnal Syiar Hukum. fakultas Hukum UNISBA volume. XIII. No. 3 November 2011.

Pillpis Dillah, Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke 3, Bandung: Alfabeta.

Purnawan, Hendra, 2012, *Analisis Persepsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Kabupaten Semarang Terhadap Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran*, Semarang: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo.

Refgiani, Devika, 2016, *efektivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah (studi kasus pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera)*, Surabaya: Fakultas Hukum, UNAIR.

Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sholihin, Ahmad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sofiyah, 2011, *Analisa efektifitas keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 berkaitan tentang Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mâl Wa Tamwil (BMT) Bima Magelang*, Salatiga: Fakultas Syariah, STAIN.

Suhendi, Yusuf, 2010, *Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

Sutedi, Adrian 2009, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Tim penyusun kamus pusat bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed.3, Cet ke-3.

www.definisi-pengertian.com/2015/05/sejarah-berdirinya-baitul-mal-wattamwil-bmt.html, diakses pada tanggal, 11 juni 2017.

www.luqmannomic.wordpress.com, 2007, diakses pada tanggal, 11 juni 2017.



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT FANSHOB KARYA

Badan Hukum Nomor : 11 / BH / KDK 13.27 / XI / 2000
Alamat : Jalan KH. Agus Salim No. 77 Telp. (0353) 889962 Bojonegoro



PROFIL KOPERASI KSPPS BMT FANSHOB KARYA

1. Nama Koperasi : KSPPS BMT Fanshob Karya
2. Nomor Badan Hukum : 11/PAD/DK.13.27/XI/2016
3. Tanggal Badan Hukum : 24 Nopember 2000
4. Tanggal/ Tahun Berdiri : 17 Januari 1999
5. Nomor NPWP : 02.255.174.1.601.000
6. Nomor SIUP : 517/069/208.412/PK/2010
7. Nomor TDP : 131625200162
8. Status Kantor : Milik Sendiri
9. Telepon Kantor : 0353 - 889962
10. Alamat : Jl. KH. Agus Salim No.77, Telepon (0353) 889962
Desa. Kauman, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro
Provinsi Jawa Timur
11. Nama Ketua : Drs. Abdul Syukur Mu'id
No. Telepon / HP : 082332230713
12. Nama Manajer : Julia Hidajati, SE
Telepon : 0353 (883542) /Hp.081330363442
13. Jumlah Pengawas : 2 (Dua) orang
14. Jumlah Karyawan : 3 (Tiga) orang
15. Jumlah Anggota : 595 orang
16. Keragaan Koperasi
 - a. Unit Usaha Koperasi : Simpan Pinjam
 - b. Jumlah Modal Koperasi : Rp 1.379.040.840
 - c. Jumlah Modal Luar : Rp 4.361.334.551
 - d. Asset : Rp 5.820.580.300
 - e. Volume Usaha : Rp. 11.222.200
 - f. SHU Unit Usaha : Rp. 30.204.909
17. Bentuk Kerjasama Perbankan : Sudah
Yaitu dengan Bank Syariah Mandiri Cab. Bojonegoro dalam bentuk pemberian dana bantuan modal kerja dengan sistem angsuran selama 36 bulan.

Bojonegoro, 20 April 2017
Ketua KSPPS BMT Fanshob Karya

Drs. H. Abdul Syukur Mu'id



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT FANSHOB KARYA

Badan Hukum Nomor : 51 / BH / KDK / 13/27 / XI / 2000
Alamat : Jalan KH. Agus Salim No. 77 Telp. (0353) 889962 Bojonegoro

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SUSUNAN PENGURUS DAN PENGELOLA KSPPS BMT FANSHOB KARYA PERIODE 2015 – 2018

KETUA	: Drs. H. ABDUL SYUKUR MU'ID
SEKRETARIS	: Drs. A. YANI ARIFIN
BENDAHARA	: AHMAD YASIN, SE
PENGAWAS	: 1. Drs. IMAM MUSYAHADAT 2. Drs. IMRON MUAZIM
DEWAN PENGAWAS SYARI'AH	: 1. Drs. SUTAJI, M.HI 2. M. Yusuf, BA
MANAGER	: JULIA HIDAJATI, SE
PEMBUKUAN	: SITI NOOR FAIDA, SE
MARKETING	: AMIRUL MUARIFAH, S.HI

BOJONEGORO, 27 FEBRUARI 2016

**PENGURUS KSPPS
BMT FANSHOB KARYA**

Drs. H. ABDUL SYUKUR MU'ID
KETUA

LAPORAN BUANA

A. PROFIL

Nama Koperasi : KOPWAN BTM Dinar Setia
Nomor Badan Hukum : 82/BH/XVI.4/2009
Tahun Berdiri : 2008
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmad 60, Mojokampung Bjn
No. Telp : 085331250612

B. TUJUN, VISI, MISI

- Visi : Terwujudnya BTM yang terdepan, tangguh dan Profesional dalam membangun ekonomi rakyat.
- Misi : 1. Memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh anggota mitra dan masyarakat
2. Menerapkan prinsip – prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memperdayakan pengusaha mikro (kecil) serta membina kepedulian Aghnia dan Dhuafa'

C. STRUKTUR KEPENGURUSAN

- Ketua : Erni Megawati
- Sekretaris : Tatik Alawiyah
- Bendahara : Siti Noor Faida
- Pengawas : Khusnatul Mawaddah
- Anggota : Umi Kulsum
- Dewan Pengawas Syariah : Syamsul Huda
- Pengelola : Insafitil Aminah
Cicik Ernawati
Ekaningtyas Yogianti

D. KERAGAAAN KOPERASI (Data Per Desember 2016)

- Simpanan Pokok : Rp. 70.335.000,00
- Simpanan Wajib : Rp. 57.733.806,00
- Simpanan Mudharabah : Rp. 734.429.965,61
- Asset : Rp. 1.941.710.403,22.
- SHU di Tahan : Rp. 110.006.739,54

E. KEGIATAN USAHA

- Simpanan Mudharabah, Simpanan Berjangka
- Pembiayaan Murabbahah
Pembiayaan Al-Ijarah

DATA KERAGAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)

I. IDENTITAS KOPERASI

1.	Nama Koperasi	:	KSP Syariah BTM Dinar Nasyiah I
2.	Nomor/Tgl. Badan Hukum	:	518/II/BH/412.38/2004 tgl 10 Nopember 2004
3.	Nomor/Tgl. PAD	:	518/II/PAD.2/412.38/2015 tgl 18 Desember 2015
4.	Surat Ijin Usaha SP	:	-
5.	Alamat	:	
	- Jalan	:	Ade Irma Suryani No. 42 C
	- Kecamatan	:	Bojonegoro
	- Kel./Desa	:	Sumbang
	- Kab./Kota	:	Bojonegoro
6.	Telp.Kantor/HP	:	081331960288
7.	E-mail	:	dorismursit@gmail.com
8.	Pengurus Koperasi	:	
	- Ketua	:	Ummi Sholihah, S.Thi Hp. 082234727933
	- Bendahara	:	Insafitil Aminah, S.Pd.I Hp. 085231259190
	- Sekretaris	:	Laily Ummul Mukminin, S.Pd Hp. 08125987611
9.	Pengawas Koperasi	:	
	- Ketua	:	Qomariyah, S.Ag Hp. 081335501722
	- Anggota	:	Miftahul Jannah, S.Pd.I Hp. 081234249660
10.	Dewan Pengawas Syariah	:	M. Arif Susanto, M.Pd.I Hp. 082334138559
11.	Jumlah Anggota	:	523 Orang
12.	Jumlah Calon Anggota	:	36 Orang
13.	Manager	:	1 Orang / 1 Pr
14.	Karyawan	:	3 Orang/ 1 Lk, 2 Pr

II. ASPEK KEUANGAN

		Tahun Buku 2016	Tahun Buku 2015
1.	Simpanan Diterima	: 3.730.670.848	4.894.232.013
2.	Modal Pinjaman	: 1.200.000.000	266.342.000
3.	Modal Sendiri	: 2.003.134.837	680.134.615
4.	Modal Penyertaan	: -	-
5.	Total Asset	: 7.259.554.247	5.998.922.255
6.	Pinjaman Diberikan	: 5.102.349.900	4.600.144.000
7.	Volume Usaha	: 2.638.849.300	1.690.560.331
8.	SHU	: 105.037.739	139.342.651

Ketua Pengurus
KSPPS BTM Dinar Nasyiah I

(Ummi Sholihah, S.Thi)

I. IDENTITAS KOPERASI

1.	Nama Koperasi	:	Kopsyah BTM Dinar Mulia
2.	Nomor/ Tgl. Badan Hukum	:	786/BH/XVI.4/2015 tgl 03 September 2015
3.	Nomor/ Tgl. PAD	:	-
4.	Surat Ijin Usaha SP	:	08/XVI.4/518.3/XI/2015
5.	Alamat	:	
	• Jalan	:	Jl. Hasanuddir, No. 16
	• Kecamatan	:	Bojonegoro
	• Kel./ Desa	:	Kauman
	• Kab./ Kota	:	Bojonegoro
6.	Telp. Kantor/ HP	:	085204920062
7.	E-mail	:	-
8.	Website	:	-
9.	Pengurus Koperasi		No. HP
	• Ketua	:	Muchlisotul Furda S,Pd 085646365956
	• Bendahara	:	Cebeng A. Ustadza 081330317671
	• Sekretaris	:	Yuni Asih 085523064940
10.	Pengawas Koperasi		
	• Ketua	:	Istiqial Fitri 081233255891
	• Anggota	:	Lina Afifah Achsani 08563181317
11.	Jumlah Anggota	:	91 Orang / 10 Lk, 81 Pr
12.	Jumlah Calon Anggota	:	-
13.	Manager	:	1 Orang / Perempuan
14.	Karyawan	:	1 Orang / Perempuan
15.	Jumlah Kantor Cabang	:	-

II. ASPEK KEUANGAN

		Tahun Buku 2016	Tahun Buku 2015
1.	Simpanan Diterima	Rp. 358.596.825	Rp. 110.736.775
2.	Modal Pinjaman	Rp. 61.048.000	Rp. 35.585.000
3.	Modal Sendiri	Rp. 32.795.800	Rp. 17.323.500
4.	Modal Penyertaan	-	-
5.	Total Asset	Rp. 474.458.175	Rp. 176.405.550
6.	Pinjaman Diberikan	Rp. 373.430.500	Rp. 156.129.000
7.	Volume Usaha	Rp. 91.790.000	Rp. 48.188.500
8.	SHU	Rp. 16.036.450	Rp. 11.052.575
9.	Skoring Hasil Penilaian Kesehatan (Telah Dinilai Oleh Dinas)	-	-

Ketua Pengurus
Kopsyah BTM Dinar Mulia

Muchlisotul Furda S,Pd



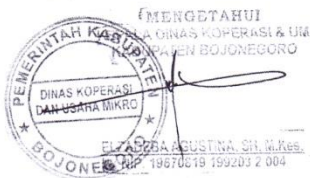
BMT EL WANITA FANSHOB

Badan hukum No. 071/BH/XVI.4/2009

SUSUNAN PENGURUS DAN PENGELOLA KSPPS BMT EL WANITA FANSHOB PERIODE 2016 – 2018

KETUA : RINI ISNAINI, S.Pd
SEKRETARIS : Hj.ASTUTIK
BENDAHARA : JULIA HIDAJATI, S.E
PENGAWAS : YUNI ROHMAWATI, S.Pd
ANGGOTA : 1.AMBAR SULISTYOWATI, S.E
2.NUR ANITA, Amd.Kep
DEWAN PENGAWAS SYARIAH : NUR KHOLILAH
MANAGER : SHELLY YANA
PEMBUKUAN : NURUL ISNAINI

BOJONEGORO, 07 FEBRUARI 2016



Susunan Pengurus
BTM Dinar Mulia
Bojonegoro

Ketua	: Muchlisotul Furda
Sekretaris	: Yuni Asih
Bendahara	: Cebeng A. Ustadza
Anggota	: Faridaturrifqiyah
Pengawas I	: Istiqlal Fithri
Pengawas II	: Lina afifah Ahsani

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DSN-MUI

Sertifikat

diberikan kepada:

Moch. Suberi

sebagai

Peserta

Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Level I
pada 22 - 24 Mei 2016 M / 15 - 17 Sya'ban 1437 H di Surabaya, dengan hasil

Baik

Jakarta, 15 Juli 2016

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
Badan Pelaksana Harian

Sekretaris,

Dr. H. Anyar Abbas, MM, M Ag

DR. KH. Ma'ruf Amin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DSN-MUI

Sertifikat

diberikan kepada:

Moh. Ali Mas'udi

sebagai

Peserta

Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Level I
pada 18 - 19 Agustus 2016 M / 15 - 16 Dzulq'adah 1437 H di Malang, dengan hasil

Baik

Jakarta, 26 September 2016

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
Badan Pelaksana Harian

Ketua,

DR. KH. Ma'ruf Amin



Sekretaris,

Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DSN-MUI

Sertifikat

diberikan kepada:

Moh. Wahyudi

sebagai

Peserta

Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Level I
pada 22 - 24 Mei 2016 M / 15 - 17 Sya'ban 1437 H di Surabaya, dengan hasil

Baik

Jakarta, 15 Juli 2016

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
Badan Pelaksana Harian

DR. KH. Ma'ruf Amin
Ketua

Sekretaris,

Dr. H. Anwar Abbas

Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DSN MUI

Sertifikat

diberikan kepada:

Miftahul Anam

sebagai

Peserta

Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Level I
pada 22 - 24 Mei 2016 M / 15 - 17 Sya'ban 1437 H di Surabaya, dengan hasil

Baik

Jakarta, 15 Juli 2016

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
Badan Pelaksana Harian

Ketua,


DR. KH. Ma'ruf Amin

Sekretaris,


Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DSN-MUI

Sertifikat

di berikan kepada:

Drs. KH. Abdul Kharis

sebagai

Peserta

Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Level I
pada 22 - 24 Mei 2016 M / 15 - 17 Sya'ban 1437 H di Surabaya, dengan hasil

Baik

Jakarta, 15 Juli 2016

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
Badan Pelaksana Harian

Sekretaris,


Ketua,
DR. KH. Ma'ruf Amin


Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Itsna Nur Farikhah
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 11 Juni 1996
Nama Orang Tua : Machfudz (ayah) Umi Sa'adah (ibu)
Alamat Asal : Dk Ngitik RT 10 / RW 02 Ds Tanjungharjo,
Kec. Kapas Kab. Bojonegoro

Riwayat Pendidikan

2001-2007	MI Hidayatul Islam Tanjungharjo
2007-2010	SMP <i>plus</i> Al Fatimah Bojonegoro
2010-2013	MA Unggulan STEP-2 IDB Darul 'Ulum Peterongan Jombang
2013-2018	Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Semarang, 27 Desember 2017

Itsna Nur Farikhah
NIM. 132311074